

**ANALISIS DINAMIKA HUBUNGAN PRANCIS DAN MALI PADA KONFLIK
MALI TAHUN 2019-2022 MENGGUNAKAN PENDEKATAN *GAME THEORY***

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ANITA RACHMAWATI

21323234

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**ANALISIS DINAMIKA HUBUNGAN PRANCIS DAN MALI PADA KONFLIK MALI
TAHUN 2019-2022 MENGGUNAKAN PENDEKATAN *GAME THEORY***

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ANITA RACHMAWATI

21323234

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Dinamika Hubungan Prancis Dan Mali Pada Konflik Mali Tahun

2019-2022 Menggunakan Pendekatan Game Theory

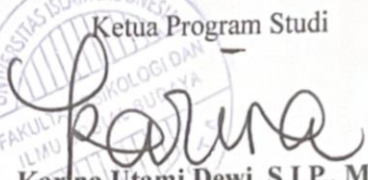
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

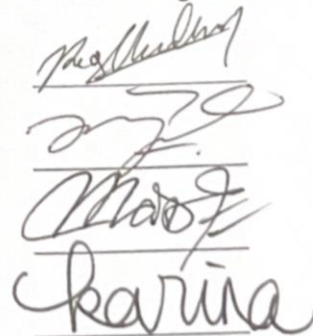
Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Farhan Abdul Majiid, S.Sos., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A
- 4 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 16 Mei 2025



Anita Rachmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2 KEPENTINGAN PRANCIS DAN MALI SEBAGAI AKTOR DALAM KONFLIK MALI TAHUN 2019-2022	17
2.1 Kepentingan Prancis sebagai Aktor dalam Konflik Tahun 2019-2022.....	19
2.1.1 Kepentingan Prancis terhadap Mali dalam Aspek Ekonomi.....	20
2.1.2 Kepentingan Prancis terhadap Mali dalam Aspek Politik dan Keamanan.....	22
2.2 Kepentingan Mali sebagai Aktor dalam Konflik Tahun 2019-2022.....	25
2.2.1 Kepentingan Mali dalam Aspek Politik.....	26
2.2.2 Kepentingan Mali dalam Aspek Keamanan	29

BAB 3 APLIKASI CHICKEN GAME PADA HUBUNGAN PRANCIS DAN MALI DALAM KONFLIK MALI TAHUN 2019-2022	34
3.1 Skenario <i>Chicken Game</i> pada Hubungan Prancis dan Mali dalam Konflik Mali Tahun 2019-2022	35
3.1.1 Skenario 1: Prancis (<i>Straight</i>) dan Mali (<i>Swerve</i>)	35
3.1.2 Skenario 2: Prancis (<i>Swerve</i>) dan Mali (<i>Swerve</i>)	36
3.1.3 Skenario 3: Prancis (<i>Swerve</i>) dan Mali (<i>Straight</i>)	37
3.1.4 Skenario 4: Prancis (<i>Straight</i>) dan Mali (<i>Straight</i>)	38
3.2 Hasil <i>Chicken Game</i> pada Hubungan Prancis dan Mali dalam Konflik Mali Tahun 2019-2022	42
3.2.1 Tekanan Junta Mali terhadap Prancis	43
3.2.2 Perubahan Sikap Prancis atas Ultimatum Mali	48
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Payoff Matrix Chicken Game</i> Prancis dan Mali pada Konflik Mali 2019-2022	14
Tabel 2. Kepentingan Prancis dan Mali sebagai Aktor dalam Konflik Mali 2019-2022	18
Tabel 3. <i>Payoff Matrix</i> antara Prancis dan Mali dalam Konflik Mali Tahun 2019-2022	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Persebaran Pangkalan Militer Prancis di Mali	4
Gambar 2. <i>Payoff Matrix Chicken Game</i>	12
Gambar 3. Wilayah Konflik Jihadis di Mali Tahun 2019.....	22

DAFTAR SINGKATAN

AIGE	: <i>The Independent Election Management Authority</i>
AQIM	: <i>Al-Qaeda in the Islamic Maghreb</i>
BOAD	: <i>Banque Ouest-Africaine de Développement</i>
CMAS	: <i>Coordination des Mouvements Associations et Sympathisants</i>
CNSP	: <i>National Committee for the Salvation of the People</i>
CNT	: <i>Conseil National de la Transition</i>
EBID	: <i>ECOWAS Bank for Investment and Development</i>
ECOWAS	: <i>Economic Community of West African States</i>
EU	: <i>Expected Utility</i>
EUCAP	: <i>European Union Capacity Building Mission in Mali</i>
EUTM	: <i>European Union Training Mission in Mali</i>
FAMA	: <i>Forces Armées Maliennes</i>
FAN	: <i>Niger Armed Forces</i>
FSD	: <i>Front pour la Sauvegarde de la Démocratie</i>
HRPD	: <i>Human Rights and Protection Division</i>
IBK	: <i>Ibrahim Boubacar Keita</i>
ISGS	: <i>Islamic State Greater Sahara</i>
JNIM	: <i>Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin</i>
M5-RPM	: <i>Mouvement du 5 juin-Rassemblement pour le Mali</i> <i>Mali</i>
MINUSMA	: <i>United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in</i>
MLF	: <i>Macina Liberation Front</i>
MNLA	: <i>Mouvement National de Libération de l'Azawad</i>
MUJAO	: <i>Mouvement Pour L'unification et le Jihad en Afrique De L'ouest</i>
PMC	: <i>Private Military Company</i>
SOFA	: <i>The Status of Forces Agreement</i>

ABSTRAK

Gagalnya operasi militer Barkhane dalam memerangi terorisme telah menjadi salah satu faktor dari munculnya sentimen anti-Prancis di Mali. Hal ini ditandai dengan banyaknya peristiwa pelanggaran HAM terhadap warga sipil serta gelombang kudeta yang kemudian menciptakan pemerintahan yang otoriter. Saat berkuasa, junta Mali benar-benar menentang intervensi Prancis yang puncaknya berada pada pengusiran duta besar Prancis pada Januari 2022. Atas peristiwa tersebut, Prancis memutuskan untuk menarik pasukannya sebagai bentuk tindakan rasionalnya dalam menghindari ketegangan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan keputusan yang terjadi antara Prancis dan Mali melalui *game theory* oleh James D. Morrow. Dalam penelitian ini, diasumsikan jika Prancis dan Mali sama-sama mempunyai 2 pilihan, yaitu *swerve* atau *straight* dengan beberapa kemungkinan yang menyertainya. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa Prancis memilih untuk menyerah setelah mendapat tekanan dari Mali yang mengacu pada prinsip *conflict of inevitability* yang ada pada *chicken game*. Keputusan yang diambil oleh Prancis dan Mali menghasilkan *asymmetric nash equilibrium*, yaitu dengan Mali yang memilih *straight* dan Prancis yang memilih *swerve*.

Kata-kata kunci: Prancis, Mali, *chicken game*, konflik kepentingan, penarikan pasukan.

ABSTRACT

*The failure of the Barkhane military operation in combating terrorism has been one of the factors behind the emergence of anti-French sentiment in Mali. This is marked by numerous incidents of human rights violations against civilians and a wave of coups that subsequently created an authoritarian government. While in power, the Malian junta strongly opposed French intervention, culminating in the expulsion of the French ambassador in January 2022. Following this event, France decided to withdraw its troops as a rational measure to avoid further tensions. This study aims to analyze the correlation between decisions made by France and Mali using James D. Morrow's game theory. In this study, it is assumed that both France and Mali have two options: *swerve* or *straight*, each with several possibilities. The findings of this research indicate that France chose to 'withdraw' after being pressured by Mali, which refers to the conflict of inevitability principle in the chicken game. Furthermore, the decisions taken by France and Mali resulted in an asymmetric nash equilibrium, Mali choosing to *straight* and France choosing to *swerve*.*

Keywords: France, Mali, *chicken game*, conflict of interest, troop withdrawal.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterlibatan pasukan militer Prancis dalam konflik Mali telah terlihat sejak peristiwa kudeta tahun 2012. Konflik Mali bermula ketika kelompok separatis Tuareg melakukan pemberontakan untuk memerdekakan wilayah Azawad yang berada di utara Mali. Gerakan separatis ini dipimpin oleh Mohamed Ag Najem and Bilal Ag Acherif. Mereka membentuk *Mouvement National de Libération de l'Azawad* (MNLA) yang beraliansi dengan kelompok jihadis seperti *Al-Qaeda in the Islamic Maghreb* (AQIM), *Mouvement Pour L'unification et le Jihad en Afrique De L'ouest* (MUJAO), dan *Ansar Dine*. Untuk meredam pemberontakan tersebut, pemerintah Mali mengirim pasukan yang bernama *Forces Armées Maliennes* (FAMA). Namun kemudian, pasukan ini diusir oleh kelompok pemberontak pada Januari 2012 (Spet 2015, 68–71).

Ketidakmampuan pemerintah Mali dalam mengatasi konflik di Mali Utara telah menyebabkan aksi protes di Bamako pada bulan Februari 2012. Hingga pada akhirnya Presiden yang ditunjuk secara demokratis, Amadou Toumani Toure, dikudeta pada 22 Maret 2012. Setelah itu, Mali berada di bawah kendali junta militer dengan Presiden sementara, Dioncounda Traoré sejak 12 April 2012. Dengan demikian, situasi *vacuum of power* atau kekosongan kekuasaan ini kemudian memperluas skala pergerakan kelompok pembelot. Ketika itu, dua-pertiga dari wilayah Mali Utara telah berada di bawah kekuasaan kelompok jihadis yang di dalamnya termasuk 3 kota penting, yaitu Kidal, Timbuktu, dan Gao (Thurston 2020, 85–128).

Setelah menguasai bagian utara, kelompok tersebut mulai bergerak menuju ke selatan Mali. Mereka berhasil mengambil alih kota Konna. Kompleksnya situasi Mali di kala itu telah membuat Presiden Traoré khawatir jika kelompok tersebut akan segera menuju Mopti dan Bamako. Dalam upaya mencegah terjadinya hal tersebut, maka Presiden Traoré meminta bantuan Prancis untuk membantu memerangi kelompok jihadis melalui Dewan Keamanan PBB. Pada 11 Januari 2013, Presiden François Hollande mengirim pasukan militer sebanyak 2.900 dalam misi operasi Serval. Legalitas pasukan ini tertera pada *The Status of Forces Agreement* (SOFA) yang ditandatangani pada 7 Maret 2013 di Bamako dan pada 8 Maret 2013 di Koulouba. Misi ini berhasil merebut kembali wilayah utara Mali dari genggamannya jihadis. Operasi Serval merupakan bentuk intervensi militer jangka pendek Prancis di Mali yang berakhir pada 15 Juli 2014 (Stigall 2015, 20–24).

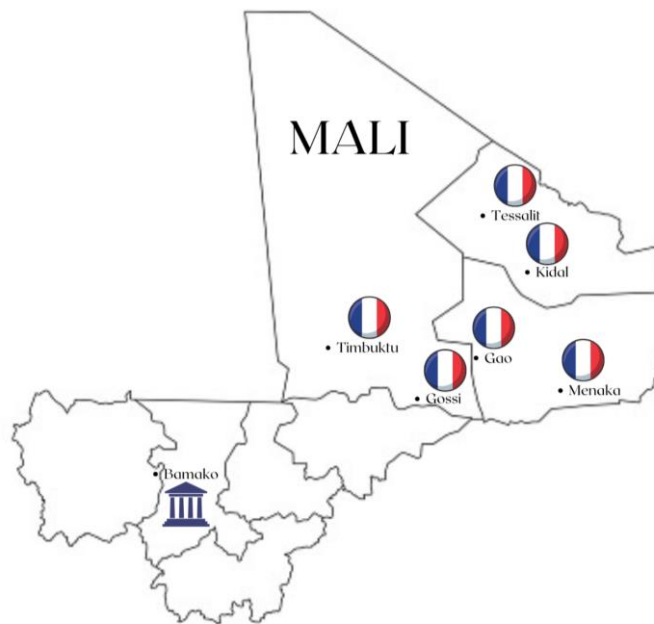
Sehari setelah operasi Serval berakhir, tepatnya 16 Juli 2014, Prancis dan Mali menandatangani pakta pertahanan yang rencananya akan berlaku selama 5 tahun ke depan. Pakta pertahanan tersebut merupakan pengganti dari perjanjian kerja sama pertahanan di tahun 1985. Adapun uraian dari kerangka kerja sama militer yang meliputi bidang intelijen, pelatihan militer Mali, dan pengadaan untuk mendukung perlengkapan pasukan Mali oleh Prancis. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan Mali, Ba N' Dao dan Menteri Pertahanan Prancis, Jean-Yves Le Drian (Ali 2018, 124).

Ancaman teroris di Mali terus berlanjut, bahkan di beberapa negara tetangga seperti Niger, Burkina Faso, Chad, dan Mauritania. Kompleksnya situasi ini telah mendorong Prancis untuk meluncurkan operasi militer lanjutan pada 1 Agustus 2014. Sebanyak 4.500 pasukan diutus dalam misi militer Barkhane dengan 2.400 pasukan ditempatkan di Mali. Salah satu hal yang menarik dari operasi militer

Prancis terletak pada motivasi Prancis. Motivasi ini tentu berkaitan erat dengan nilai budaya serta kebijakan *Anti-Terroriste*. Bagi Prancis, terorisme merupakan ancaman yang selalu menjadi fokus utama di bidang keamanan. Prancis juga menganggap bahwa aksi terorisme sangat bertentangan dengan nilai Eropa. Melalui *White Paper on Defense 2013, La Lutte Contre Le Terrorisme*, Prancis menyatakan secara tegas terkait perlawanan terhadap terorisme. Keamanan dalam negeri negara-negara di Eropa juga dapat terganggu dengan masuknya pengungsi ilegal dari wilayah yang rentan terhadap ancaman terorisme (Ma'rifat 2021, 246–47).

Dalam upaya mendukung jalannya operasi militer Barkhane, Prancis mendirikan pangkalan militer yang tersebar di timur laut Mali seperti Gao, Kidal, Timbuktu, dan Tessalit. Pangkalan militer di Gao merupakan pangkalan militer utama yang difasilitasi dengan helikopter tempur, *groupements tactiques désert*, dan kendaraan lapis baja. Pada tahun 2018, Prancis mendirikan pangkalan militer di zona perbatasan Mali, Burkina Faso, dan Niger, tepatnya di Menaka. Selain itu, Prancis juga mendirikan pangkalan militer baru yang terletak di dekat Mali tengah dan berbatasan dengan Burkina Faso, tepatnya di Gossi. Maka tidak mengherankan jika operasi Barkhane merupakan operasi militer terbesar dan termahal bagi Prancis dengan alokasi dana yang mencapai €600 juta hingga €1 miliar per tahunnya (Winnerstig 2019). Adapun peta persebaran pangkalan militer Prancis per tahun 2019 yang dijelaskan melalui **gambar 1**.

Gambar 1. Peta Persebaran Pangkalan Militer Prancis di Mali



Sumber: European Council on Foreign Policy (2019).

Selama operasi Barkhane berlangsung, pasukan militer Prancis telah berhasil menangkap pemimpin dari kelompok-kelompok teroris seperti Abdelmalek Droukdel, pemimpin dari AQIM dan Bah ag Moussa, pemimpin dari *Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin* (JNIM). Bahkan, Prancis juga menginisiasi terbentuknya aliansi pertahanan dan keamanan G5 sebagai bentuk ambisinya untuk memerangi terorisme (Charbonneau 2021, 1813–14). Namun, di samping sisi keberhasilannya, operasi militer ini telah menyebabkan ketidakstabilan yang kian parah bagi Mali. Meningkatnya jumlah korban jiwa, kekerasan, krisis pengungsi, serta aktivitas kelompok jihadis telah menurunkan angka kepuasan masyarakat Mali terhadap Prancis. Bahkan, lamanya operasi militer telah membuat masyarakat Mali mempertanyakan motif intervensi. Pada tahun 2019, tercatat bahwa lebih dari 90% masyarakat Mali tidak puas dengan kinerja Prancis dalam operasi militer Barkhane. Padahal di tahun 2013, kepuasan masyarakat Mali terhadap operasi

militar Barkhane sempat mencapai angka 97%. Angka kepuasan ini diperoleh setelah Prancis melancarkan operasinya selama 5 minggu (Prasetyo 2024, 115–16).

Pada bulan Juni dan Juli 2020, demonstrasi besar-besaran terjadi di Bamako yang menuntut Presiden Ibrahim Boubacar Keita (IBK) mundur dari jabatannya dan mengusir Prancis dari Mali. Pada akhirnya, peristiwa kudeta seperti tahun 2012 kembali terjadi dengan digulingkannya Presiden IBK dari jabatannya sebagai bentuk ketidakpuasan junta terhadap penanganan konflik oleh kelompok jihadis maupun non-jihadis. Aksi kudeta ini kemudian memperoleh kecaman dari berbagai pihak seperti *Economic Community of West African States* (ECOWAS), Uni Afrika, Uni Eropa, dan Prancis. ECOWAS meminta agar junta segera melakukan transisi pemerintahan sipil. Namun, junta Mali tidak menginginkan transisi tersebut dan justru memperpanjang kekuasaannya hingga tahun 2025. Tindakan ini membuat ECOWAS marah dan menjatuhkan sanksi embargo serta penangguhan anggota terhadap Mali. Begitu pula dengan Prancis yang siap menjatuhkan sanksi setelah adanya kudeta kedua (Strauss and Evans 2022).

Ancaman sanksi yang disampaikan oleh Presiden Macron justru membuat junta Mali merasa bahwa Prancis terlalu ikut campur dengan politik domestiknya. Sejak saat itu, hubungan antara Prancis dan Mali makin memburuk. Ketegangan antara keduanya juga telah menyebabkan Mali mengusir duta besar Prancis pada 31 Januari 2022. Peristiwa ini kemudian diikuti dengan penarikan pasukan Prancis dari Mali pada Februari 2022 karena menganggap bahwa junta Mali tidak serius dalam memerangi terorisme. Pada Mei 2022, Mali memutuskan keluar dari kerja sama keamanan dengan Prancis. Sebagai respons atas tindakan Mali, Prancis menyatakan bahwa operasi Barkhane resmi berakhir pada 9 November 2022 (Doukhan 2022).

Dari rincian di atas, maka dapat dilihat bahwa Prancis dan Mali sama-sama memiliki ambisi untuk mempertahankan kepentingannya. Di satu sisi, junta ingin mempertahankan kekuasaannya dan menolak intervensi Prancis di Mali, sedangkan di sisi yang lain Prancis tetap ingin menjadi mitra keamanan Mali serta mengupayakan terwujudnya demokrasi. Situasi yang konfrontatif akibat kepentingan yang kontradiktif ini akan relevan jika diteliti dengan kerangka analisis *game theory*. Dalam hal ini, Prancis dan Mali dihadapkan dengan pilihan yang penuh risiko. Apabila keduanya terus menekan, maka eskalasi konflik akan terus meningkat dan konfrontasi langsung akan terjadi sebagai konsekuensi terburuk bagi kedua belah pihak. Lantas dalam hal ini diperlukan adanya pihak yang mengalah agar dapat terhindar dari konsekuensi terburuk.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika hubungan Prancis dan Mali pada konflik Mali tahun 2019-2022 dari perspektif *game theory*?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagaimana berikut ini:

1. Untuk menganalisis kepentingan Prancis dan Mali sebagai aktor yang terlibat selama berlangsungnya konflik Mali tahun 2019-2022.
2. Untuk menganalisis tindakan Prancis dalam merespons konflik Mali tahun 2019-2022 dari perspektif *game theory*.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh Prancis dan Mali sebagai aktor dalam konflik Mali tahun 2019-2022 dari perspektif *game theory*.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini mempunyai fokus pada intervensi Prancis di Mali yang berlangsung selama periode waktu 2019-2022. Penentuan periode ini didasarkan pada dimulainya aksi penolakan Mali terhadap operasi militer Barkhane dan intervensi asing di tahun 2019. Selanjutnya, gelombang kudeta terjadi secara berturut-turut di tahun 2020, 2021, dan 2022. Bentrokan kepentingan dengan junta membuat Prancis melawan jihadis secara independen tanpa adanya dukungan dari Mali. Hambatan ini muncul ketika junta Mali bersikeras untuk mempertahankan kekuasaannya dan semakin menutup diri dari Barat. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan Prancis untuk menghindari risiko konfrontasi dengan junta adalah dengan menarik pasukannya pada tahun 2022.

Limitasi dari penelitian ini juga terdapat pada aktor yang akan dikaji, yaitu Prancis dan Mali. Hal ini didasarkan pada besarnya kontribusi Prancis untuk melindungi Mali sebagai bekas koloninya dari ancaman teroris. Dalam konflik Mali, Prancis merupakan mitra keamanan Mali yang menjalankan operasi militer anti jihadis terlama, yaitu selama 1 dekade. Bahkan, misi militer Eropa yang bergabung dalam *Takuba Task Force* juga dipimpin oleh Prancis.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama ditulis oleh Foster (2022) yang berjudul “*Leadership Dynamics in Foreign Interventions: Russia and France in Mali 2012-2022.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan *identity leadership* dalam melihat intervensi Prancis dan Rusia pada konflik Mali tahun 2012-2022. Tulisan ini menekankan bahwa identitas merupakan faktor kunci dalam kepemimpinan. Dalam hal ini kegagalan intervensi Prancis terjadi karena bertentangan dengan kepentingan

serta nilai-nilai Mali. Hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan dari pihak Mali untuk mengakhiri intervensi, sehingga tidak ada ruang bagi Prancis untuk terus bertahan di Mali. Sebaliknya, Rusia tengah mendapat sambutan hangat dari Mali. Kekecewaan Mali terhadap Barat telah menjadi alasan utama mengapa mereka ingin menjalin kerja sama keamanan dengan Rusia yang berstatus sebagai kekuatan non Barat.

Penelitian kedua ditulis oleh Bertrand, Chafer, and Stoddard (2024) yang berjudul “*(Dis)utilities of Force in a Postcolonial Context: Explaining the Strategic Failure of the French-Led Intervention in Mali.*” Penelitian menggunakan konsep ‘*utility of force*’ dalam melihat kegagalan intervensi militer Prancis yang memicu kembali ketegangan pascakolonial. Hasil daripada penelitian ini adalah gagalnya intervensi militer Prancis salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan Prancis dalam meningkatkan keamanan di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik serta kurang memahami perubahan karakter konflik. Setelah operasi militer resmi dihentikan, Prancis tidak benar-benar bisa mencapai tujuannya dalam menumpas kelompok terorisme di Mali. Prancis meninggalkan Mali dalam situasi yang memprihatinkan dengan siklus kekerasan terus berlanjut dan terus menyebar ke seluruh wilayah.

Penelitian ketiga cenderung berfokus pada aplikasi *chicken game* pada situasi konflik. Penelitian ini ditulis oleh Langlois (1991) yang berjudul “*Rational Deterrence and Crisis Stability.*” Artikel ini menyoroti studi kasus krisis misil Kuba yang sempat membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet bersitegang. Penempatan nuklir di Kuba oleh Uni Soviet dianggap sebagai ancaman keamanan oleh AS. Dalam konflik ini, keduanya mengalami dilema terkait tindakan maupun risiko yang membersamainya seperti kehilangan kendali nuklir, ancaman berupa

pembatasan penggunaan nuklir, serta ancaman pembalasan dengan serangan nuklir. Maka dari itu, strategi pencegahan diperlukan agar perang nuklir tidak terjadi.

Melalui model permainan *chicken game*, AS memiliki 2 pilihan dalam merespons nuklir Uni Soviet yaitu memblokade jalur laut atau melakukan serangan udara. Di saat yang sama, Uni Soviet memiliki 2 pilihan untuk merespons tindakan AS yaitu dengan menarik senjata nuklirnya atau mempertahankannya. Apabila upaya AS tidak bisa menekan Uni Soviet untuk segera menarik senjata nuklirnya, maka tindakan pembalasan akan terjadi dan berujung pada perang nuklir. Keduanya tentu akan mengalami kerugian. Untuk menghindari konsekuensi kerugian tersebut, Uni Soviet akhirnya bersedia untuk menarik nuklirnya dari Kuba.

Secara keseluruhan, 2 penelitian pertama berfokus pada intervensi Prancis di Mali dan juga menyoroti aspek-aspek kegagalan dari intervensi tersebut. Sedangkan penelitian ketiga berfokus pada aplikasi *chicken game* pada situasi konflik dengan pilihan ‘menyerah atau mundur’ merupakan pilihan terbaik untuk menghindari kerugian serta kemungkinan skala konflik yang lebih besar. Dari beberapa tulisan di atas, maka penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan penelitian yang menjadi pembeda dari penelitian penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menganalisis tindakan Prancis dalam menarik pasukan militernya dari Mali pada tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan teori *chicken game* oleh James D. Morrow. Dalam studi kasus ini, pengambilan keputusan oleh Prancis dan Mali mencerminkan situasi *bounded rationality* atau keterbatasan rasional. Hal ini dikarenakan keputusan strategis dibuat dengan menggunakan heuristik. Meski demikian, studi kasus ini masih relevan diteliti dengan menggunakan *chicken game* dalam melihat logika interaksi strategis yang terjadi pada 2 pemain yang saling mengancam dan tidak mau mengalah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Morrow (1994) dalam bukunya yang berjudul *Game Theory for Political Scientists*, ia menjelaskan bahwa *game theory* digunakan untuk melihat bagaimana keputusan antar individu saling terkait serta menghasilkan hasil. Rasionalitas merupakan asumsi dasar dari *game theory* yang di dalamnya menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tujuan dan mereka akan berusaha untuk mencapai tujuan mereka melalui sebuah tindakan. *Rational choice* atau pilihan rasional akan selalu berdampingan dengan gagasan keseimbangan yang kemudian lebih dikenal dengan konsep *nash equilibrium*. Artinya, tidak ada pemain yang dapat meningkatkan hasil mereka dengan mengubah strategi secara unilateral. Oleh karena itu, di dalam *game theory*, keputusan setiap aktor biasanya akan bergantung pada keputusan aktor yang lain (Morrow 1994, 73).

Dalam memahami kompleksnya dunia sosial dan politik, diperlukan sebuah penyederhanaan atau yang disebut dengan *formal modeling* (Morrow 1994, 6). *Game theory* memiliki banyak jenis permainan yang salah satunya adalah *non zero-sum game*. Adapun ciri khas daripada *non zero-sum game* yang sekaligus menjadi pembeda dari *zero-sum game*, yaitu kemenangan bagi seorang pemain bukan berarti kekalahan bagi pemain lain. *Non zero-sum game* sendiri terbagi menjadi 2, yaitu *cooperative game* dan *non-cooperative game*. *Cooperative game* berarti sebuah permainan yang memungkinkan adanya kerja sama serta komunikasi antar aktor. Sedangkan *non-cooperative game* adalah sebuah permainan yang didalamnya tidak terdapat kerja sama serta komunikasi antar aktor. Aplikasi *non-cooperative game* dalam model interaksi strategis sering ditemukan pada *prisoner's dilemma*, *chicken game*, ataupun *stag hunt* (Morrow 1994, 95).

Prinsip daripada *chicken game* adalah *conflict of inevitability* yang berarti menghindari terjadinya konflik. Model permainan *chicken game* dianalogikan dalam sebuah perlombaan yang melibatkan 2 orang remaja untuk saling memacu mobilnya dari arah yang saling berlawanan. Kedua remaja ini sama-sama memiliki ambisi untuk memenangkan perlombaan tersebut dan berharap pihak lawan membanting stir terlebih dahulu. Jika keduanya terus melaju, maka mereka akan bertabrakan dan mengalami kerugian bersama. Namun, jika salah satu dari mereka membanting stir, maka ia dianggap sebagai pengecut (*chicken*). Menyerahnya salah satu pemain akan memberikan rasa *pride* kepada pihak bertahan (Morrow, 95).

Untuk menentukan *expected utility* (EU), maka dapat diawali dengan menyusun skenario tindakan aktor dan bagaimana tindakan lawan mempengaruhi hasil. Setelah itu, penentuan *preference* (P) aktor dengan melakukan observasi terhadap tindakan apa yang paling disukai hingga yang paling dihindari. Preferensi aktor ini kemudian akan direpresentasikan dalam bentuk numerik yang nantinya akan dipetakan ke dalam *payoff matrix* (Morrow 1994, 16–20).

Dalam konteks *chicken game*, Morrow mensimulasikan 2 aktor yang terlibat dalam konflik, yaitu *player 1* dan *player 2* yang harus memilih antara 2 tindakan yang berupa *swerve* (S1) atau *straight* (S2). EU diperoleh dengan menyusun skenario tindakan aktor yang kemudian nilai utilitas disubstitusikan ke dalam bentuk numerik sebagai berikut (Morrow, 95):

1. Skenario 1: *player 1* memilih *straight* (10) dan *player 2* memilih *swerve* (0), maka *straight* > *swerve* yang menjadi strategi terbaik.
2. Skenario 2: *player 1* memilih *swerve* (5) dan *player 2* memilih *swerve* (5) merupakan strategi pilihan terbaik kedua.

3. Skenario 3: *player 1* memilih *swerve* (0) dan *player 2* memilih *straight* (10), maka $swerve > straight$ menjadi strategi yang dihindari.
4. Skenario 4: *player 1* memilih *straight* (-5) dan *player 2* memilih *straight* (-5), maka ini menjadi strategi dengan konsekuensi terburuk dan dihindari oleh aktor.

Dari skenario di atas, maka disusunlah preferensi tindakan yang berupa $10 > 5 > 0 > -5$. Selanjutnya, angka preferensi dipetakan melalui *payoff matrix* pada gambar 2.

Gambar 2. Payoff Matrix Chicken Game

		Player 2	
		s_1	s_2
Player 1	s_1	(5,5)	(0,10)
	s_2	(10,0)	(-5,-5)

Sumber: Morrow (1994).

Dalam *payoff matrix chicken game* di atas, terdapat 2 *nash equilibrium* yaitu (*player 1*, s_1 dan *player 2*, s_2) dan (*player 1*, s_2 dan *player 2*, s_1). Morrow mensimulasikan jika hasil dari *chicken game* ini adalah *player 1* sebagai pihak yang memilih s_2 dan berhasil mempengaruhi *player 2* untuk memilih s_1 . Strategi *straight* (10) oleh *player 1* memberikan nilai utilitas yang lebih besar daripada *player 2* yang memilih strategi *swerve* (0) (Morrow, 95).

Model *chicken game* lebih relevan digunakan sebagai alat analisis dalam menjelaskan hubungan antara Prancis dan Mali daripada model *prisoner's dilemma* ataupun *stag hunt*. Apabila studi kasus Prancis dan Mali diteliti dengan model *prisoner's dilemma*, maka harus melibatkan pihak ketiga yang berwenang untuk

mengadili dan membelot menjadi strategi terbaik. Sedangkan model *stag hunt* akan relevan untuk menganalisis terciptanya kerja sama antara Prancis dan Mali (Morrow, 279).

Dalam realitanya, Prancis dan Mali berada pada situasi yang saling ingin menundukkan lawan yang dipicu oleh perbedaan kepentingan. Mali ingin mendapatkan kedaulatan dan mengakhiri intervensi Prancis Mali. Sedangkan Prancis ingin mempertahankan pengaruhnya dengan upaya memaksa junta untuk mengembalikan pemerintahan sipil. Tindakan saling menggertak ini memberikan hasil akhir berupa Mali sebagai pihak yang mampu menekan Prancis dengan mengusir duta besar Prancis pada Januari 2022. Setelah pengusiran tersebut, Prancis memilih menyerah atau menjadi “*chicken*” dengan mengumumkan untuk menarik pasukannya dari Mali pada Februari 2022 setelah adanya pengusiran tersebut.

1.7 Argumen Sementara

Meningkatnya ketegangan dalam hubungan Prancis dan Mali membuat keduanya terjebak di dalam situasi dilematis dan mengharuskan keduanya mengambil tindakan untuk menghindari konsekuensi terburuk. Untuk memaksimalkan utilitas, maka Prancis dan Mali menyusun segenap strategi yang digunakan dalam menghadapi satu sama lain. Preferensi tindakan ini kemudian disubstitusikan dalam bentuk numerik. Adapun preferensi tindakan yang telah disusun oleh Prancis dan Mali, yaitu:

1. Skenario 1: Prancis memilih *straight* (10) dan Mali memilih *swerve* (0), maka *straight* > *swerve* yang menjadi strategi terbaik.

2. Skenario 2: Prancis memilih *swerve* (5) dan Mali memilih *swerve* (5) merupakan strategi pilihan terbaik kedua.
3. Skenario 3: Prancis memilih *swerve* (0) dan Mali memilih *straight* (10), maka *swerve* > *straight* menjadi strategi yang dihindari.
4. Skenario 4: Prancis memilih *straight* (-5) dan Mali memilih *straight* (-5), maka ini menjadi strategi dengan konsekuensi terburuk dan dihindari oleh aktor.

Dari preferensi tindakan di atas, maka terbentuklah *ordinal preference* bagi Prancis dan Mali, yaitu $(\text{straight}, \text{swerve}) > (\text{swerve}, \text{swerve}) > (\text{swerve}, \text{straight}) > (\text{straight}, \text{straight})$ yang kemudian disusun dalam *payoff matrix* seperti pada **tabel 1.**

Tabel 1. Payoff Matrix Chicken Game Prancis dan Mali pada Konflik Mali 2019-2022

Prancis \ Mali	Swerve	Straight
	Swerve	Straight
Swerve	5,5	0,10
Straight	10,0	-5,-5

Payoff matrix chicken game Prancis dan Mali di atas menyajikan 2 *nash equilibrium* yaitu (Prancis *swerve*, Mali *straight*) dan (Prancis *straight*, Mali *swerve*).

Dalam merespon konflik Mali tahun 2019, Prancis mengirimkan sejumlah pasukan yang kemudian direspon dengan aksi penolakan oleh Mali. Pengusiran duta besar Prancis oleh junta Mali pada Januari 2022 menjadi puncak dari ketegangan antara keduanya. Upaya ini menjadi bentuk ultimatum junta Mali terhadap Prancis sehingga akhirnya Prancis memilih *swerve* dengan menarik

pasukannya dari Mali pada Februari 2022. Oleh karena itu, *chicken game* pada hubungan Prancis dan Mali menghasilkan nilai utilitas 10 bagi Mali sebagai pihak yang bertahan dan nilai 0 bagi Prancis sebagai pihak yang menyerah atau "*chicken*."

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis dinamika hubungan Prancis dan Mali pada konflik Mali 2019-2022 menggunakan *game theory* adalah berupa *formal modeling* dengan mengolah data kualitatif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek daripada penelitian ini adalah Prancis dan Mali. Sedangkan objek penelitiannya adalah berupa dinamika hubungan Prancis dan Mali pada konflik Mali 2019-2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan artikel yang relevan untuk mengkaji penelitian ini secara lebih lanjut.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dilakukan dengan melalui beberapa tahap seperti pengumpulan data, pengolahan data, dan eksplanasi data secara tertulis. Tahap pengumpulan data meliputi pengumpulan referensi bacaan yang relevan untuk kemudian dibaca. Pencatatan hasil perolehan data perlu dilakukan untuk membantu proses pemahaman data secara akurat dan komprehensif. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yang diperoleh dari beberapa sumber bacaan, diklasifikasikan berdasarkan sub pembahasan yang relevan. Kemudian, tahap selanjutnya adalah

tahap eksplanasi data dari data-data yang sudah diolah akan diinterpretasikan melalui penulisan penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian akan dijabarkan dalam 4 bab dengan rincian sebagaimana berikut ini:

1. Bab 1 mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, serta proses penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.
2. Bab 2 akan membahas terkait kepentingan Prancis dan kepentingan Mali sebagai aktor utama yang terlibat dalam konflik Mali tahun 2019-2022.
3. Bab 3 akan membahas terkait aplikasi *chicken game* pada hubungan Prancis dan Mali selama konflik Mali tahun 2019-2022.
4. Bab 4 akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

KEPENTINGAN PRANCIS DAN MALI SEBAGAI AKTOR DALAM KONFLIK MALI TAHUN 2019-2022

Prancis dan Mali merupakan aktor utama yang terlibat serta memiliki kepentingan dalam merespons konflik Mali tahun 2019-2022. Bab kedua dari penelitian ini akan membahas terkait kepentingan Prancis dan Mali selama berlangsungnya konflik Mali tahun 2019-2022. Konflik kepentingan yang terjadi antara Prancis dan Mali juga melibatkan kelompok teroris, otoritas Mali, Prancis, serta tentara bayaran Rusia bernama *Wagner group* yang semakin menambah kompleksnya proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini berargumen bahwa operasi militer Prancis sebagai respon terhadap masifnya serangan terorisme di tahun 2019 telah mengubah pandangan Mali terhadap Prancis. Awalnya, Mali menganggap jika Prancis merupakan mitra keamanan yang membantunya dalam memerangi terorisme pada tahun 2013. Akan tetapi sejak tahun 2019, operasi militer yang dilakukan oleh Prancis berubah menjadi ancaman keamanan bagi Mali karena operasi militer ini justru berkontribusi pada peningkatan jumlah pelanggaran HAM di Mali. Dengan demikian, terjadilah reformasi rezim pemerintahan di Mali oleh junta yang memiliki kepentingan untuk kedaulatan dan mengakhiri intervensi Prancis. Namun, disisi lain, Prancis tetap ingin mempertahankan pengaruhnya di Mali dan berperan dalam menciptakan stabilitas regional yang dimotivasi dengan beberapa kepentingan strategis yang akan dijelaskan melalui **Tabel 2**.

**Tabel 2. Kepentingan Prancis dan Mali sebagai Aktor dalam Konflik Mali
2019-2022**

Kepentingan Prancis	Kepentingan Mali
Ekonomi: Niger dan Mali merupakan salah satu pemasok kebutuhan uranium Prancis. Uranium berperan penting dalam penyediaan energi nuklir di banyak negara di dunia yang berada di bawah perusahaan energi Prancis, AREVA.	Politik: Junta militer yang berkuasa sejak tahun 2020 memiliki kepentingan politik untuk meningkatkan legitimasi di kalangan masyarakat Mali. Tidak kompetennya presiden IBK dalam mengupayakan tata kelola pemerintah telah membuat masyarakat tidak puas dan menginginkan adanya reformasi pemerintah.
Politik Keamanan: Prancis ingin mengambil peran dalam menciptakan stabilitas regional melalui operasi militer yang berangkat dari kekhawatirannya akan tragedi 9/11. Operasi militer dimaksudkan untuk mencegah masuknya kelompok teroris dan pengungsi ilegal ke wilayah Eropa karena kedekatan jarak antara benua Afrika dan benua Eropa secara geografis. Operasi militer sebagai upaya dalam memproteksi sumber energi Prancis di negara bekas jajahannya dari negara adidaya seperti Tiongkok.	Keamanan: Tidak efektifnya operasi militer Barkhane dalam memerangi terorisme telah membuat masyarakat Mali mendukung junta untuk menjalin hubungan militer dengan <i>Wagner group</i>, Russia. <i>Wagner group</i> berperan sebagai mitra keamanan Mali yang baru setelah Mali memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis.

Sumber: (Besenyő and Solyomfi 2024, 157–61).

Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai kepentingan Prancis dan Mali pada konflik Mali tahun 2019-2022, maka bagian pertama pada bab ini akan memaparkan terkait kepentingan Prancis sebagai aktor dalam konflik Mali tahun 2019-2022 yang didalamnya terdapat ECOWAS dan Uni Eropa. Pada bagian kedua dari bab ini akan memaparkan terkait kepentingan Mali sebagai aktor dalam konflik Mali tahun 2019-2022 yang didalamnya terdapat junta militer, kelompok teroris, dan *Wagner group* Rusia.

2.1 Kepentingan Prancis Sebagai Aktor dalam Konflik Mali 2019-2022

Pada tahun 2019, model konflik Mali mengalami perubahan dari yang awalnya konflik teroris menjadi konflik komunal yang semakin memperparah situasi Mali dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai mitra keamanan Mali, maka Prancis memberikan bantuan keamanan dengan beberapa operasi militer. Bantuan keamanan ini tentu dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan seperti ekonomi, politik, dan keamanan.

2.1.1 Kepentingan Prancis dalam Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, Prancis sangat bergantung pada pasokan uranium dari Mali dan Niger yang memenuhi 2/3 dari kebutuhan listrik Prancis. Proses produksi dan ekspor uranium berada di bawah kendali perusahaan Prancis, yaitu AREVA yang sekarang bernama Orano dan *Electricite de France* (EDF) yang bertanggung jawab atas 59 pembangkit listrik tenaga nuklir di Prancis. Energi nuklir sangat penting bagi Prancis karena menyumbang sekitar 75-80% dari total energi yang digunakan. Perusahaan ini menghasilkan sekitar 480 Terawatt energi nuklir bagi Prancis (Fariaty 2022, 322–24).

Selain Prancis, AREVA juga berperan dalam pengadaan layanan pembangkit listrik di beberapa negara di wilayah Eropa, Afrika, Amerika Utara, Tiongkok, serta Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki 100 lebih cabang perusahaan yang tersebar di 40 negara di dunia. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika AREVA menjadi salah satu pemasok kebutuhan listrik terbesar di dunia yang menyediakan listrik untuk sekitar 25 juta rumah. AREVA juga telah berperan dalam membuka lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan sekitar 156.000 karyawan di perusahaan induk dan 50.000 karyawan lainnya di anak perusahaan yang tersebar di negara lain (Filippov 2015, 172).

Menurut *World Nuclear Association*, AREVA mengendalikan 17% dari total produksi uranium global dan menempati peringkat ketiga di dunia dalam ekstraksi uranium. Peran penting perusahaan AREVA terhadap perekonomian Prancis telah menjadi alasan mengapa Prancis menempatkan pasukan militernya di beberapa negara bekas jajahan di Afrika. Selain daripada alasan keamanan, pasukan militer Prancis menjadi alat untuk memproteksi sumber kekayaan mineral seperti tambang uranium di Niger dari penguasaan negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat (Filippov 2015, 172).

2.1.2 Kepentingan Prancis dalam Aspek Politik Keamanan

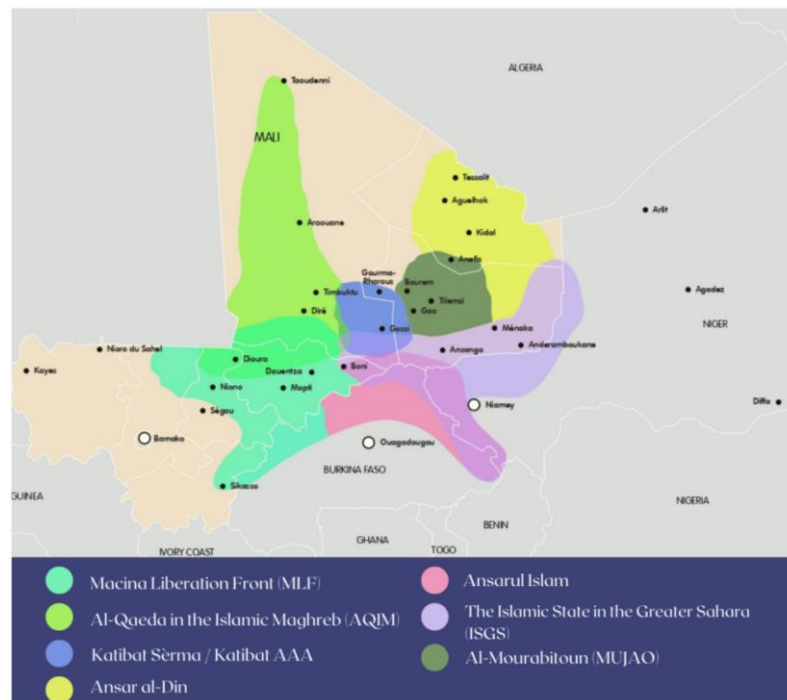
Operasi militer Prancis dimaksudkan untuk Prancis ingin tetap mempertahankan pengaruh koloni atau *francafrique* di saat pengaruh Tiongkok mulai menguasai sektor perdagangan dan investasi di Afrika serta mewujudkan stabilitas kawasan. Terorisme menjadi ancaman bagi keamanan Eropa mengingat akan dekatnya jarak benua Afrika dan Eropa secara geografis. Kewaspadaan Prancis terhadap teroris dan tragedi 9/11 menjadi alasan mengapa kebijakan anti-jihadis dan *counterterrorism* masih terus digalakkan di negara bekas jajahannya. Terlebih pada kondisi Mali yang merupakan salah satu tempat bagi kelompok-kelompok jihadis yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan ISIS (Kanti 2013, 20–22)

Kondisi politik yang tidak stabil semakin memudahkan kelompok-kelompok ini untuk menginvasi wilayah Mali sebagaimana yang terjadi pada tahun 2019. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa operasi Barkhane yang dilakukan oleh Prancis terlihat kewalahan dalam memerangi para jihadis. Bahkan, konflik antar komunal terus terjadi yang mengakibatkan makin banyaknya jumlah korban kekerasan dan korban jiwa dari warga sipil (Baldaro and D'Amato 2024, 525–26).

Pada tahun 2019, ancaman keamanan Mali berasal dari masifnya serangan kelompok teroris. Selain itu, pemerintahan yang korup dan tidak akuntabel, impunitas, serta kekuatan militer yang lemah menjadi bukti dari buruknya tata kelola keamanan Mali. Dalam hal ini, pasukan militer Mali sering didapati melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil saat dikerahkan di wilayah konflik. Akibatnya banyak di antara masyarakat, khususnya di bagian utara Mali, merasa tertindas dan tidak memperoleh perhatian dari pemerintahan pusat. Dengan demikian, kekosongan kekuasaan menjadi cikal bakal masuknya kelompok teroris di Mali utara yang kemudian bergabung dalam aksi-aksi pemberontakan rakyat terhadap pemerintah di Bamako (Foster 2022, 12–13).

Sejauh ini, kelompok teroris terbesar yang berada di Mali adalah JNIM dan *Islamic State Greater Sahara* (ISGS). JNIM sendiri merupakan gabungan dari beberapa kelompok ekstrimis seperti MUJAO, AQIM, dan *Macina Liberation Front* (MLF). JNIM dibentuk pada tahun 2017 dan dipimpin oleh Iyad ag Ghali dari etnis Tuareg. Seiring berjalannya waktu, pergerakan kelompok teroris di utara cukup ekspansif dengan menguasai wilayah Mali tengah. Adapun wilayah konflik jihadis di Mali pada tahun 2019 yang ditunjukkan melalui **gambar 3**.

Gambar 3. Wilayah Konflik Jihadis di Mali Tahun 2019



Sumber: European Council on Foreign Policy (2019).

Secara khusus, JNIM menargetkan serangan kepada pasukan militer, baik militer Mali maupun militer internasional. Tercatat pada tanggal 20 Januari 2019, JNIM menyerang pangkalan militer *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA) di dekat Aguelhoc, Kidal. Peristiwa ini menewaskan 10 orang dari pasukan penjaga perdamaian Chad dan 25 orang lainnya terluka. Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2019, JNIM menyerang kamp militer di Dioura, Mopti yang menewaskan 23 tentara FAMa. Selanjutnya, pada tanggal 2 April 2019, seorang dokter militer Prancis tewas akibat mobil yang ditumpanginya menabrak ranjau darat (IED) di Foulseré, Mopti. Terdapat serangan susulan pada tanggal 21 April yang menargetkan pangkalan militer Guire di daerah Koulikoro. Insiden ini menewaskan sekitar 10 orang pasukan FAMa (United States Department of State 2019).

Setelah beberapa bulan, kelompok yang diduga sebagai teroris melakukan serangan terhadap pangkalan militer tepatnya pada tanggal 30 September. Peristiwa ini terjadi di wilayah perbatasan Mali dengan Burkina Faso. Mereka menyerang pos FAMA di Mondoro serta pangkalan gabungan FAMA-G5 *Sahel Joint Force* di Bouliekessi. Serangan ini mengakibatkan tewasnya 38 tentara FAMA, 17 orang terluka, dan 27 orang lainnya dinyatakan hilang. JNIM menyatakan bertanggung jawab atas insiden tersebut (United States Department of State 2019).

JNIM kerap kali memasang ranjau darat (IED) yang menargetkan militer Prancis namun, terkadang ledakan alat ini justru salah sasaran dan menewaskan warga sipil. Seperti insiden yang terjadi pada tanggal 20 April, sebuah ledakan terjadi di antara wilayah Douentza dan Boni, Mopti yang kemudian menewaskan seorang penjaga perdamaian Mesir dan empat lainnya terluka. Berdasarkan laporan dari *Security Council PBB, A/HRC/43/76*, ranjau darat menghantam kendaraan angkutan umum di jalan Douentza-Boni, Mopti pada 3 September 2019. Dari 60 penumpang bus, 14 orang diantaranya meninggal, 24 orang terluka, dan 7 orang lainnya kritis (Human Rights Council 2020, 2–3).

MINUSMA mengumumkan adanya 20 serangan yang dilakukan oleh AQIM terhadap anggotanya pada bulan Oktober. Sedangkan pada 1 November kelompok ISGS melakukan penembakan massal di pangkalan militer Indelimane, Menaka. Peristiwa ini menewaskan sekitar 53 orang tentara Mali dan seorang warga sipil. Bulan Oktober dan November 2019 merupakan puncak dari gelombang serangan kelompok teroris. Terdapat sekitar 150 tentara yang tewas. Insiden ini telah memengaruhi kredibilitas FAMA yang notabenenya sebagai penjaga perdamaian di mata penduduk Mali (Fournier 2020, 11).

Banyaknya serangan terorisme menjadi alasan bagi Prancis untuk mengubah strategi tunggal pada operasi militernya menjadi operasi militer gabungan dengan mengerahkan pasukan dari Eropa dan FAMA. Dalam mendukung legalitas operasi militer, Prancis mengadakan pertemuan bersama Mali, Mauritania, Chad, Burkina Faso, dan Niger pada KTT Pau tanggal 13 Januari 2020. KTT Pau membahas serangkaian kerja sama militer yang berupa (Gazeley 2022, 279–280):

1. Penambahan pasukan Prancis sebesar 600 orang di Sahel;
2. Mekanisme perang melawan jihadis yang difokuskan di wilayah perbatasan Mali, Burkina Faso, dan Niger; serta
3. Mengadakan operasi militer gabungan dengan pasukan Eropa dalam *The Takuba Task Force* sebagai respons atas konflik di tahun 2019.

Prancis bersama 9 negara sekutu di Eropa membentuk *The Takuba Task Force* pada Maret 2020. Misi ini terdiri dari 900 orang pasukan yang berasal dari Prancis, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Hongaria, Italia, Belanda, Portugal, dan Swedia. Tugas utama dari misi ini adalah membantu operasi militer Barkhane dalam mengadakan operasi militer gabungan, melatih tentara Mali serta memerangi kelompok terorisme ISGS di wilayah Gao dan barat Niger (Eichler 2023, 76).

Di awal tahun 2020, tepatnya tanggal 3-23 Maret, Prancis mengencarkan operasi militer Moncler selama 3 minggu. Operasi militer ini mengerahkan 1.700 pasukan militer Barkhane dan 3.000 tentara gabungan dari FAMA, *Niger Armed Forces* (FAN), dan satuan militer Burkina Faso. Operasi militer ini memiliki fokus untuk menetralsir terorisme di wilayah perbatasan Mali, Niger, dan Burkina Faso yaitu di wilayah Liptako dan Gourma. Pasukan gabungan ini difasilitasi dengan sekitar 400 unit kendaraan lapis baja. Salah satu keberhasilan dari operasi militer

ini dapat dilihat dari hancurnya tempat tempat persembunyian para teroris beserta alutsista yang mereka miliki (Olech 2023, 5).

Penolakan yang dilakukan oleh Mali tidak menggoyahkan ambisi Prancis untuk tetap melancarkan misi militer. Meski operasi militer Barkhane telah dikritik oleh masyarakat Mali, Prancis tetap menunjukkan tindakan ‘bertahan’ dengan kembali melakukan operasi militer lanjutan yang diberi nama operasi militer Bourrasque. Operasi militer ini didukung dengan 1.600 pasukan dari tentara Prancis dan 1.400 pasukan dari FAMA dan *Niger Armed Forces* (FAN). Operasi militer ini berlangsung selama 28 September-1 November 2020 yang melibatkan militer FAMA, FAN, dan militer Barat seperti Inggris, Amerika, dan Denmark. Operasi ini berhasil melemahkan kelompok teroris AQIM yang berada di wilayah Afrika Utara (Doucet, Demeyere, and Boulmier 2021, 846).

Operasi militer Bourrasque kemudian disusul dengan operasi militer Eclipse yang melibatkan lebih dari 3.400 tentara yang terdiri dari 1.500 tentara Prancis dan 900 tentara Burkina Faso, 850 tentara Mali, dan 150 tentara Niger. Pasukan ini difasilitasi alat perang yang berupa 500 kendaraan tempur, helikopter, dan pesawat angkut taktis. Sejauh ini, kelompok teroris seperti JNIM dan ISGS merupakan aktor utama dari banyaknya serangan di wilayah Mali. Pada 8 April 2021, seorang jurnalis Prancis bernama Oliver Dubois disandera oleh JNIM di wilayah Gao (Dolman 2021, 5–6).

2.2 Kepentingan Mali Sebagai Aktor dalam Konflik Mali 2019-2022

Perubahan model konflik teroris menjadi konflik komunal telah mengurangi legitimasi pemerintah Mali karena dianggap tidak kompeten dalam memerangi kelompok teroris. Pasukan keamanan sering didapati melakukan tindakan yang

melanggar HAM terhadap warga sipil. Selain itu, pemerintahan yang korup dan tidak akuntabel, impunitas, serta kekuatan militer yang lemah membuat masyarakat kecewa dan menginginkan adanya reformasi pemerintahan. Dengan demikian, terjadilah kudeta militer pada tahun 2020 yang dimotivasi oleh beberapa kepentingan, yaitu politik dan keamanan.

2.2.1 Kepentingan Mali dalam Aspek Politik

Ketidakpuasan masyarakat Mali terhadap pemerintahan Presiden IBK telah menjadi alat pendukung bagi junta Mali untuk mengadakan reformasi pemerintah. Protes masyarakat dimulai ketika Mahkamah Agung Mali mengeluarkan keputusan yang cukup kontroversial. Pasalnya, Mahkamah Agung Mali membatalkan hasil sementara pemilu dari 31 kursi parlemen dari total 147 kursi pada tanggal 30 April 2020. Hasil akhir pemilu legislatif ini tampak mengecewakan warga Mali (United States Department of State 2020).

Selain itu, protes ini juga dipicu oleh lemahnya pemerintah Mali dalam menangani konflik dan adanya tuduhan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh presiden IBK. Dengan demikian, banyak warga Mali yang merasa kecewa dan frustrasi yang memicu aksi protes anti pemerintah di wilayah Bamako, Mopti, Kayes, dan Sikasso. Mereka menuntut pergantian presiden dan pembubaran Mahkamah Agung Mali (MINUSMA 2020). Akibatnya, demonstrasi besar-besaran terjadi di pusat pemerintahan Bamako pada tanggal 11-19 Juni serta 10-13 Juli 2020 oleh kelompok bernama *Mouvement du 5 juin-Rassemblement pour le Mali* (M5-RPM) (Morgan 2020, 43).

Kelompok ini terdiri dari beberapa kelompok oposisi seperti *Front pour la Sauvegarde de la Démocratie* (FSD), *Espoir Mali Koura*, dan *Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants* (CMAS). Aksi protes dipimpin oleh

seorang tokoh ulama yang bernama Imam Mahmoud Dicko yang tidak puas dengan rezim Keita dan operasi militer Barkhane. Aksi demonstrasi ini kemudian disusul dengan kudeta militer pada Agustus 2020 (Bertrand, Chafer, and Stoddard 2024, 295–297).

Kudeta Mali pertama terjadi pada 18 Agustus 2020 yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goita. Upaya kudeta ini berhasil menggulingkan Presiden IBK dari jabatannya. Pada tanggal 19 Agustus 2020, Kolonel Assimi Goita menahan Presiden IBK, Perdana Menteri (Boubou Cisse), Kepala Majelis Nasional (Moussa Timbine), dan 8 jenderal lainnya. Setelah lengsernya Presiden IBK, pendukung oposisi di Bamako turun ke jalan untuk merayakan hal tersebut dan mengatakan jika ini merupakan titik kemenangan bagi rakyat Mali (Korotayev and Khokhlova 2022, 206).

Peristiwa kudeta ini telah memicu kemarahan ECOWAS. Otoritas ini menuntut pembebasan Ibrahim Boubacar Keita beserta beberapa pejabat lainnya. Selain itu, ECOWAS juga memaksa agar junta Mali segera mengembalikan pemerintahan sipil dan tatanan konstitusional serta mengadakan pemilihan umum dalam kurun waktu 18 bulan. Dalam hal ini, ECOWAS juga menjatuhkan sanksi terhadap Mali berupa penutupan perbatasan Mali, embargo, serta menanggukkan keanggotaan Mali sejak tanggal 19 Agustus 2020. Selain daripada tekanan ECOWAS, tekanan dari internasional juga telah memaksa Mali untuk memulihkan pemerintahannya (UNHCR 2022).

Dari adanya tekanan tersebut, Mali mulai membentuk struktur pemerintahan transisi dengan melantik Bah Ndaw sebagai presiden sementara dan Kolonel Assimi Goita sebagai wakilnya pada 25 September 2020. Di saat yang sama, Moctar Ouane ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Pemerintah transisi juga mempersiapkan

pelaksanaan pemilihan umum presiden dan lembaga legislatif untuk bulan Februari 2022 dengan membentuk dewan reformasi, *National Committee for the Salvation of the People* (CNSP) pada 5 Oktober 2020 (Socher 2023, 249–50).

Melihat dari upaya reformasi yang diperjuangkan oleh pemerintah sementara Mali, ECOWAS memberikan dukungan dengan mencabut sanksi yang diberikan pada 6 Oktober 2020. Selanjutnya, Kolonel Assimi Goita juga memenuhi tuntutan internasional untuk membebaskan Presiden IBK dan beberapa pejabat yang ditahan lainnya pada 7 Oktober 2020. Setelah pemenuhan janji tersebut, CNSP kemudian dibubarkan pada 18 Januari 2021 atas keputusan presiden yang mengacu pada piagam pemerintahan transisi. Dalam piagam ini disebutkan jika pemilihan umum presiden dan parlemen untuk pemerintahan sipil akan dilaksanakan pada bulan 27 Februari 2022 (Zulueta-Fülscher and Noël 2022, 80–82).

Pada tanggal 24 Mei 2021, satuan militer yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goita, kembali melakukan kudeta. Mereka melucuti kekuasaan serta menangkap presiden interim beserta perdana menterinya atas tuduhan pelanggaran terhadap piagam transisi Mali dan dugaan sabotase. Peristiwa ini dikenal dengan “kudeta dalam kudeta.” Setelah dilucuti kekuasaanya, Bah Ndaw dan Moctar Ouane ditangkap di kamp militer Soundiata Keita, Kati. Setelah ditangkap, Bah Ndaw menyatakan mengundurkan diri pada 26 Mei 2021 dan sejak saat itu Kolonel Assimi Goita kembali menjadi presiden. Ia menunjuk Choguel Maïga sebagai perdana menteri sipil yang baru (Haidara 2024, 98–99).

Di bawah kepemimpinannya, Goita mengalihkan fungsi legislatif ke *Conseil National de la Transition* (CNT) atau biasa disebut sebagai dewan transisi nasional. Salah satu wewenang dari dewan ini adalah menyusun konstitusi Mali yang baru. Dewan ini diketuai oleh Kolonel Malick Diaw yang dahulunya

merupakan anggota dari CNSP. Terdapat 121 orang yang ditunjuk untuk mengisi kursi di CNT. Sebanyak 22 kursi diantaranya diisi oleh pasukan keamanan Mali, 11 kursi untuk partai dan organisasi politik, dan 8 kursi lainnya untuk M5-RPM (Korotayev and Khokhlova 2022, 203).

Sejak peristiwa kudeta kedua ini, junta militer tampak enggan menepati janjinya untuk mengembalikan pemerintahan sipil dengan batas maksimal Februari 2022. Bahkan pada Oktober 2021, junta mengumumkan jika pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan pada Februari 2022 diundur menjadi Desember 2025. Keputusan ini mengindikasikan jika Goita dan anggota dari CNT benar-benar ingin tetap mempertahankan kekuasaan. Goita juga menginginkan terciptanya Mali dengan wajah baru. Ambisi ini tentu memicu banyak perdebatan hingga akhirnya dialog intens mengenai agenda reformasi dan isu-isu prioritas dilaksanakan pada Konferensi *Assises Nationales de Refondation*, tanggal 27-30 Desember 2021. Hasilnya, pemilihan umum tetap tidak bisa dilaksanakan pada bulan Februari karena alasan keamanan. Melihat keputusan Mali yang melanggar ketentuan, ECOWAS kemudian memberlakukan sanksi individu bagi junta berupa penangguhan perjalanan. Selain itu, ECOWAS juga memberi sanksi tambahan pada Januari 2022. Dengan sanksi ECOWAS, keadaan Mali semakin memburuk dan akses di berbagai layanan umum juga semakin terbatas. Akibatnya banyak warga Mali yang makin terpuruk dan menginginkan adanya transisi pemerintahan (Africa Center for Strategic Studies 2023).

2.2.2 Upaya Junta untuk Mengakhiri Intervensi Prancis

Ketidakpuasan masyarakat Mali juga ditujukan kepada operasi militer Prancis yang dianggap tidak berjalan secara efektif. Alih-alih memerangi terorisme, operasi militer justru berkontribusi pada besarnya angka pelanggaran HAM

terhadap warga sipil. Pendekatan militeristik yang dilakukan oleh Prancis dalam memerangi terorisme tidak berperan secara signifikan dalam meningkatkan keamanan di Mali. Oleh karena itu, pengerahan pasukan militer Prancis mendapatkan penolakan dari Mali. Prancis yang dahulunya merupakan mitra keamanan Mali seketika berubah menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan Mali.

Selama berlangsungnya operasi militer, pasukan militer Prancis juga berkontribusi pada besarnya angka pelanggaran HAM di Mali. Dalam hal ini, *Human Rights and Protection Division* (HRPD) MINUSMA, merilis sebuah laporan terkait serangan udara militer Prancis dalam sebuah acara pernikahan di Desa Bounti. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer Eclipse yang terjadi pada 3 Januari dan menewaskan sekitar 22 orang yang diantaranya adalah 19 orang warga sipil. Sedangkan, 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Penyerangan ini terjadi atas dugaan bahwa perkumpulan tersebut merupakan kelompok teroris. Namun, Kementerian Pertahanan Prancis menyangkal laporan tersebut pada komunike yang diadakan pada 30 April (Roth 2022).

Kurangnya akuntabilitas Prancis atas kematian warga sipil telah membuat warga Mali marah dan makin kecewa dengan pasukan Prancis. Peristiwa ini bukan kali pertama Prancis menyangkal tuduhan penyerangan terhadap warga sipil. Berdasarkan hasil investigasi, Prancis ternyata pernah membunuh seorang warga sipil di dekat desa Tagarangabout, Mali Tengah pada 17 Mei 2020. Kejadian ini bermula ketika korban sedang mengendarai motor dan tampak mendekati tentara Barkhane. Kemudian, tentara tersebut melepaskan sebuah tembakan yang menewaskan korban. Berdasarkan laporan MINUSMA tahun 2021, terdapat 5 pemuda tewas di dekat Desa Talataye akibat serangan udara pada tanggal 25 Maret.

Serangan ini diduga berasal dari aktivitas militer Prancis karena disaat yang sama mereka sedang melancarkan serangan udara di Desa Talataye. Namun, saat dimintai keterangan, militer Prancis kembali menyangkal fakta serangan tersebut dan mencoba meyakinkan publik dengan mengatakan jika yang terkena serangan semuanya ada teroris (Freudenthal et al. 2021).

Selama junta Mali berkuasa, sentimen anti Prancis di kalangan masyarakat semakin meningkat. Kebencian ini dipengaruhi oleh adanya provokasi dari junta Mali yang menarasikan Prancis sebagai aktor neokolonialisme. Selain itu, kegagalan Prancis dalam operasi militer Barkhane semakin memberikan kesempatan bagi junta untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Upaya ini berhasil menurunkan popularitas Prancis di Mali. Hubungan antara Mali dan Prancis juga tampak renggang setelah kudeta kedua ini (International Crisis Group 2023).

Eskalasi ketegangan antara Prancis dan Mali kembali terjadi saat ribuan warga Mali melakukan aksi protes di Bamako pada 22 September 2021 yang menuntut Prancis dan ECOWAS untuk mengakhiri intervensinya. Demonstrasi diorganisir oleh gerakan *Yerewolo Debout sur les Ramparts*. Gerakan ini juga mendorong agar junta Mali melakukan kerja sama militer dengan Rusia. Sebanyak 87% warga Mali setuju untuk menjalin kerja sama keamanan dan kontra terorisme dengan *private military company* (PMC) Rusia, *Wagner group*. *Wagner group* berada di bawah kepemimpinan Yevgeny Prigozhin dan tercatat melakukan intervensi militer di wilayah Afrika dan Timur Tengah (Mohamedou 2024, 20).

Junta Mali dan *Wagner group* Rusia mulai menjalin kerja sama secara resmi sejak Desember 2021. Dalam hal ini, Mali terikat kontrak dengan *Wagner group* senilai US\$10,8 juta yang dialokasikan untuk melatih militer Mali serta

pengamanan intensif. Jauh sebelum kerja sama ini terbentuk, Rusia pernah mengirimkan 4 unit helikopter MI-171 pada tahun 2019. Guna mendukung jalannya misi kontra terorisme saat ini, *Wagner group* mengerahkan sekitar 1.000 pasukan di Mali. *Wagner group* juga melakukan kampanye disinformasi di kalangan masyarakat Mali untuk makin bisa menyingkirkan Prancis. Sebagai imbalannya, *Wagner group* memperoleh konsesi tambang emas Mali dan kelompok ini mendapatkan akses untuk menempati bekas pangkalan militer Prancis (Krieger 2022, 29).

Aksi demonstrasi dan kudeta kedua telah membuat ECOWAS marah dan menjatuhkan sanksi tambahan pada bulan Januari 2022. Sanksi ini dimaksudkan untuk mengisolasi Mali, melemahkan ekonomi, dan menekan junta untuk tidak lagi menunda pemilihan umum. ECOWAS menjatuhkan sanksi berupa (Adu and Mezyaev 2023, 172):

1. Penarikan perwakilan ECOWAS di Mali;
2. Penutupan perbatasan darat dan udara antara Mali dengan negara-negara anggota ECOWAS;
3. Penangguhan transaksi keuangan dan bantuan finansial dari *ECOWAS Bank for Investment and Development* (EBID) dan *Banque Ouest-Africaine de Développement* (BOAD);
4. Pembekuan aset Mali yang ada di Bank Sentral ECOWAS;
5. Pemberlakuan embargo, kecuali pada rantai pasokan pangan, obat-obatan, minyak, dan listrik.

Meski sanksi ini tampak memberikan tekanan, namun ECOWAS juga harus mempertaruhkan citranya di mata masyarakat Mali. Mereka mengatakan jika sanksi ECOWAS semakin memperburuk situasi yang ada. Sanksi ECOWAS telah

mengakibatkan semakin minimnya lapangan pekerjaan serta krisis pangan yang cukup serius akibat penutupan perbatasan dan inflasi. Sekitar 7,5 juta warga Mali membutuhkan bantuan kemanusiaan di tahun 2022. Selain itu, sanksi ini juga telah membuat Mali mengalami gagal bayar pada utangnya yang mencapai US\$ 300 juta (Maianhi and Liaga 2024, 150–52).

Akhirnya, ECOWAS mencabut sanksi pada Juli 2022 setelah junta Mali bersedia untuk menjadwalkan kekuasaannya hingga Maret 2024. Untuk mempersiapkan pemilihan umum pasca junta, otoritas Mali membentuk *the Independent Election Management Authority (AIGE)* pada bulan Oktober 2022. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Abdoulaye Maiga selaku juru bicara dari otoritas Mali. Ia mengatakan “*The transitional government specifies that the new dates for the presidential election will be communicated at a later date, following discussions with the Independent Election Management Authority (AIGE).*” Badan ini beranggotakan 15 orang dengan 8 orang perwakilan dari pemerintah, 4 orang perwakilan dari partai politik, dan 3 orang perwakilan dari warga sipil. Prancis juga tampak menyusul tindakan ECOWAS dengan menyatakan akan melanjutkan kembali operasi militer gabungannya yang sempat ditangguhkan di bulan lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Prancis pada 2 Juli 2021 (Ricard 2022, 9–10).

BAB 3

APLIKASI *CHICKEN GAME* PADA HUBUNGAN PRANCIS DAN MALI DALAM KONFLIK MALI TAHUN 2019-2022

Perubahan rezim di Mali telah mendorong berubahnya kebijakan luar negeri Mali saat ini yang berdampak pada pola hubungan Mali dengan Prancis. Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Prancis dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan dan keamanan Mali. Junta mulai mengambil tindakan-tindakan agresif untuk menekan Prancis agar segera mengakhiri intervensinya di Mali. Terdapat 2 faktor utama yang menjadi kekhawatiran Mali terhadap Prancis di Mali: *Pertama*, banyaknya kasus kekerasan dan jumlah korban jiwa dari warga sipil selama operasi militer Prancis berlangsung; *Kedua*, operasi militer gabungan yang dilakukan oleh Prancis justru semakin memperparah situasi konflik di Mali. Pasca kudeta militer tahun 2020, intervensi Prancis terlihat pada politik domestik Mali dengan mengecam aksi kudeta. Bahkan, keterlibatan Prancis dalam penjatuhan sanksi justru semakin meningkatkan ketegangan antara Mali dan Prancis. Tindakan saling membalas kemudian membawa kedua negara pada situasi *chicken game*.

Pada bab ketiga pada penelitian ini akan membahas terkait penyederhanaan studi kasus Prancis dan Mali dalam *chicken game*. Dalam hal ini, benturan kepentingan politik telah menyebabkan mereka terjebak dalam sebuah dilema. Sebagai aktor rasional, Prancis dan Mali harus memperhitungkan keuntungan serta kerugian daripada 2 pilihan utama, yaitu terus mempertahankan ambisi (*straight*) atau menyerah (*swerve*). Dengan demikian, bagian pertama dari bab ini akan memaparkan terkait skenario *chicken game* pada hubungan Prancis dan Mali dalam konflik Mali tahun 2019-2022. Bagian kedua dari bab ini akan menjelaskan terkait

hasil *chicken game* dari hubungan Prancis dan Mali dalam konflik Mali tahun 2019-2022.

3.1 Skenario *Chicken Game* pada Hubungan Prancis dan Mali dalam Konflik Mali Tahun 2019-2022

Prancis dan Mali merupakan aktor yang memainkan peran utama selama berlangsungnya konflik Mali tahun 2019-2022. Untuk memaksimalkan utilitas dalam menghadapi pihak lawan, maka Prancis dan Mali perlu membuat skenario permainan didalamnya menjabarkan terkait konsekuensi dari segenap tindakan yang diambil oleh aktor dan pihak lawan, yaitu antara tindakan *straight* atau *swerve*. Menurut Morrow (1994), akan ada 4 skenario *chicken game* dan kemungkinan yang dihasilkan tindakan *straight* atau *swerve*. Asumsikan jika tidak ada komunikasi yang terjadi antara Prancis dan Mali dan keduanya juga tidak saling mengetahui tindakan satu dengan yang lainnya. Sebagai aktor rasional, Prancis maupun Mali sama-sama memiliki keinginan untuk memaksimalkan utilitas dengan memilih strategi optimal.

3.1.1 Skenario 1: Prancis (*Straight*) dan Mali (*Swerve*)

Skenario 1 pada analisis *chicken game* menunjukkan jika terdapat sepasang preferensi tindakan yang dapat diambil oleh Prancis dengan pilihan *straight* dan Mali dengan pilihan *swerve*. Tindakan *straight* memberikan nilai utilitas maksimal bagi Prancis dengan angka 10. Dalam hal ini, angka 10 menggambarkan keunggulan Prancis atas Mali karena Prancis berhasil mempertahankan pengaruhnya di Mali. Operasi militer tetap dapat berjalan tanpa ada penolakan dari Mali, sehingga kepentingan Prancis terhadap Mali dalam sektor ekonomi, politik, dan keamanan dapat tercapai.

Sedangkan bagi Mali, tindakan *swerve* memberikan nilai utilitas yang kecil dengan angka 0. Dalam hal ini, tindakan tersebut cukup dihindari oleh Mali karena tindakan ini memberikan konsekuensi jika Mali tetap bersedia menerima intervensi Prancis yang dapat mengancam status kedaulatan Mali. Selain itu, perubahan konflik Mali telah membuat operasi militer Prancis untuk memerangi terorisme di Mali kerap kali melakukan kesalahan terhadap target serangan yang justru membunuh warga sipil.

3.1.2 Skenario 2: *Prancis (Swerve) dan Mali (Swerve)*

Skenario 2 pada analisis *chicken game* menunjukkan jika terdapat sepasang preferensi tindakan yang dapat diambil oleh Prancis dengan pilihan *swerve* dan Mali dengan pilihan *swerve*. Dalam hal ini, Prancis dan Mali akan memperoleh nilai utilitas yang sama, yaitu 5. Dengan demikian, tindakan ini menjadi opsi terbaik kedua bagi Prancis maupun Mali meski keduanya tidak bisa mencapai kepentingan dan tujuan utama. Tujuan utama daripada operasi militer Prancis di Mali adalah untuk mengambil peran strategis dalam menciptakan stabilitas regional. Sedangkan kepentingan Mali adalah memperoleh kedaulatan dan mengakhiri intervensi Prancis. Namun, tindakan *swerve* dapat menghindarkan mereka dari konsekuensi terburuk, yaitu konfrontasi langsung ketika Prancis dan Mali saling memilih pilihan *straight*.

Di dalam *chicken game*, pilihan untuk menyerah pada dasarnya akan dihindari oleh seorang aktor. Pilihan ini dapat memberikan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh aktor karena kekhawatirannya akan menjadi pengecut. Selain itu, situasi yang konfrontatif dan keterbatasan informasi semakin membuat pilihan *straight* dan menggertak lawan untuk menyerah menjadi strategi yang paling dipertahankan oleh setiap aktor. Hal ini dilakukan karena seorang aktor tidak

mengetahui tindakan lawan dan terdapat kekhawatiran untuk memilih *swerve* apabila ternyata pihak lawan masih tetap memilih *straight* yang artinya pihak yang memilih *swerve* secara tidak langsung akan menjustifikasi kemenangan pihak yang memilih *straight*.

3.1.3 Skenario 3: *Prancis (Swerve) dan Mali (Straight)*

Skenario 3 pada analisis *chicken game* menunjukkan jika terdapat sepasang preferensi tindakan yang dapat diambil oleh Prancis dengan pilihan *swerve* dan Mali dengan pilihan *straight*. Tindakan *straight* memberikan nilai utilitas maksimal bagi Mali dengan angka 10. Dalam hal ini, angka 10 menggambarkan keunggulan Mali atas Prancis karena Mali berhasil mengakhiri intervensi Prancis dan memperoleh kedaulatan serta kemandirian dalam membangun tata pemerintahan meski Mali masih dihadapkan dengan masalah keamanan yang cukup serius. Status kedaulatan yang didapatkan Mali atas negara kolonialnya dapat menjadi kesempatan bagi Mali untuk menentukan mitra keamanan yang baru, seperti *Wagner group* Rusia.

Sedangkan bagi Prancis, tindakan *swerve* memberikan nilai utilitas yang kecil dengan angka 0. Dalam hal ini, tindakan tersebut cukup dihindari oleh Prancis karena tindakan ini memberikan konsekuensi jika Prancis tidak lagi memiliki peran strategis di Mali karena adanya perubahan geopolitik yang saat ini lebih mengarah terhadap kekuatan non Barat, salah satunya adalah Rusia. Bahkan, akses Prancis terhadap sumber energi uranium di Niger juga terancam karena politik anti Prancis di Mali memberikan efek domino kepada negara tetangga, yaitu Burkina Faso dan Niger.

3.1.4 Skenario 4: *Prancis (Straight)* dan *Mali (Straight)*

Skenario 4 pada analisis *chicken game* menunjukkan jika terdapat sepasang preferensi tindakan yang dapat diambil oleh Prancis dengan pilihan *straight* dan Mali dengan pilihan *straight*. Pilihan tindakan ini berpotensi memberikan konsekuensi paling buruk bagi Prancis dan Mali dengan nilai bagi masing-masing pihak -5. Meski demikian, *straight* menjadi strategi yang dipilih oleh Prancis dan Mali untuk memaksimalkan utilitas sekaligus sebagai upaya untuk menekan pihak lawan agar segera menyerah. Tidak adanya keinginan untuk saling mengalahkan, maka telah membuat Prancis dan Mali dihadapkan dengan situasi *brinkmanship* yang penuh dilema. Apabila salah satu dari mereka bisa mempertahankan pilihannya dan membuat pihak lawan kalah, maka pihak bertahan akan merasa lebih unggul dan *pride* daripada lawan.

Dari 4 skenario di atas, maka preferensi tindakan Prancis dan Mali disederhanakan sebagaimana berikut ini:

1. Skenario 1: Prancis memilih *straight* (10) dan Mali memilih *swerve* (0), maka *straight* > *swerve* yang menjadi strategi terbaik.
2. Skenario 2: Prancis memilih *swerve* (5) dan Mali memilih *swerve* (5) merupakan strategi pilihan terbaik kedua.
3. Skenario 3: Prancis memilih *swerve* (0) dan Mali memilih *straight* (10), maka *swerve* > *straight* menjadi strategi yang dihindari.
4. Skenario 4: Prancis memilih *straight* (-5) dan Mali memilih *straight* (-5), maka ini menjadi strategi dengan konsekuensi terburuk dan dihindari oleh aktor.

Dari preferensi tindakan di atas, maka terbentuklah urutan *preference* bagi Prancis dan Mali, yaitu $(straight, swerve) > (swerve, swerve) > (swerve, straight) >$

(*straight, straight*) dan direpresentasikan dalam bentuk numerik yang menjadi $10 > 5 > 0 > -5$. Angka-angka ini dipetakan ke dalam *payoff matrix* yang berfungsi untuk menunjukkan bagaimana tindakan yang akan diambil oleh aktor saling berkaitan yang digambarkan melalui **tabel 3**.

Tabel 3. *Payoff Matrix* antara Prancis dan Mali dalam Konflik Mali Tahun 2019-2022

Mali	Swerve	Straight
	Swerve	Straight
Prancis	5,5	0,10
	10,0	-5,-5

Sumber: Morrow (1994).

Payoff matrix di atas menunjukkan angka-angka yang mewakili preferensi serta konsekuensi dari tindakan Prancis-Mali dalam konflik Mali 2019-2022. Awalnya, Prancis maupun Mali berada di posisi *straight* sebagai strategi yang dinilai memberikan utilitas maksimal, yaitu 10. Apabila pihak lawan memilih untuk mengalah, maka nilai 10 dapat tercapai. Namun apabila pihak lawan memberikan respon balasan dengan strategi serupa, maka nilai utilitas akan bergeser menjadi -5 baik bagi Prancis atau Mali.

Terdapat beberapa tindakan *straight* yang dilakukan oleh Prancis untuk mendapatkan nilai utilitas maksimal 10. Prancis meluncurkan beberapa operasi militer gabungan yang menghimpun pasukan militer dari beberapa negara Eropa. Pada 15 Februari 2021, Prancis menggelar pertemuan *N'Djamena Summit* dengan negara anggota G5. Forum ini juga dihadiri oleh beberapa mitra internasional Mali seperti Josep Borrell sebagai *EU High Representative*, Charles Michel sebagai

presiden dari *European Council*, Heiko Maas sebagai menteri luar negeri Jerman, dan perwakilan dari PBB, *African Union*, dan ECOWAS. Pada kesempatan ini, presiden Macron menyampaikan terkait penambahan jumlah pasukan *The Takuba Task Force* agar mencapai 2.000 tentara. KTT ini juga memfokuskan pada reparasi dampak konflik dan isu kemanusiaan seperti memastikan akses makanan, air bersih, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan bagi warga Mali. Selain itu, KTT memprioritaskan pembentukan sistem administrasi negara, lembaga peradilan, dan lembaga kepolisian yang lebih akuntabel. Tindakan-tindakan di atas mengindikasikan jika Prancis memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperjuangkan pengaruh geopolitiknya di Mali (Togola and Okur 2023, 374–75).

Meningkatnya eskalasi konflik antara Prancis dan Mali semakin terlihat sejak kudeta kedua. Kudeta ini telah membuat Prancis mengambil langkah ‘*bluffing*’ untuk merespon aksi kudeta. Tidak dapat dipungkiri jika 2 peristiwa kudeta yang terjadi hanya dalam 9 bulan, menandakan ketiadaan demokrasi di Mali. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan harapan Prancis yang menginginkan terciptanya tata pemerintahan Mali yang demokratis. Oleh karena itu, Prancis berusaha memberikan tekanan kepada Mali agar segera mengembalikan pemerintahan sipil dengan menangguk sementara operasi militer gabungannya di Mali pada 3 Juni 2021. Dalam hal ini, presiden Macron mengatakan jika Prancis “*not stay by the side of a country where there is no longer democratic legitimacy or transition.*” Upaya ini dilakukan untuk menekan junta agar segera mengembalikan pemerintahan sipil. Terlebih pada efek kudeta yang berdampak pada status keamanan Mali. Tekanan ini diharapkan mampu memberikan utilitas maksimal kepada Prancis dengan angka 10 dan angka ini menunjukkan keunggulan

Prancis atas Mali yang hanya memperoleh nilai utilitas yang berada pada angka 0 (Lebovich 2021).

Sebagai mitra keamanan Mali, Prancis sangat mengecam tindakan kudeta yang dilakukan oleh junta. Pernyataan "*unacceptable coup d'etat*" disampaikan oleh Presiden Emmanuel Macron dalam KTT Uni Eropa, Brussel yang diselenggarakan pada 25 Mei 2021. Melalui pernyataan "*We are ready in the coming hours to take targeted sanctions*," Prancis mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Mali melalui Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian juga mengutuk kudeta tersebut dengan mengatakan "*France condemns with the greatest firmness the violent act that occurred in Mali yesterday*." Ia juga menuntut pembebasan presiden transisi Mali dan perdana menterinya dengan mengatakan "*We demand the liberation of President Bah Ndaw and Prime Minister Moctar Ouane after strongman Assimi Goita stripped them of their powers*" (Fisayo-Bambi 2024).

Operasi militer gabungan dan ancaman terhadap kudeta Mali menunjukkan bahwa Prancis telah mengabaikan *status quo* daripada kedaulatan Mali. Dalam hal ini, Prancis beserta ECOWAS meminta agar junta mengembalikan pemerintahan sipil padahal setiap negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa ada campur tangan asing. Intervensi Prancis mengindikasikan adanya praktik neokolonialisme terhadap Mali yang berstatus sebagai negara bekas jajahan Prancis. Akhirnya, intervensi yang dilakukan oleh Prancis memicu respon balasan dari junta Mali yang memperjuangkan *status quo* daripada kedaulatan (Bhattacharya 2022, 236).

Upaya menggertak atau '*bluffing*' yang ditunjukkan oleh Prancis ternyata tidak efektif untuk melemahkan Mali dan justru direspon dengan tindakan balasan.

Sama halnya dengan Prancis, junta Mali memberikan tekanan untuk memengaruhi tindakan Prancis agar segera memilih *swerve*. Campur tangan yang dilakukan oleh Prancis dianggap sudah tidak dapat ditoleransi dan menjadi penyebab atas keterpurukan Mali dalam berbagai sektor. Prancis memberikan dukungan terhadap ECOWAS yang menjatuhkan sanksi kepada Mali. Bahkan, Mali juga menerima sanksi dari Uni Eropa setelah terjadi kudeta kedua pada Mei 2021. Keterlibatan Prancis dalam proses penjatuhan sanksi telah membuat hubungan antara Prancis dan Mali semakin memanas. Puncak dari ketegangan tersebut berada pada tindakan junta Mali yang memilih *straight* dengan mengusir duta besar Prancis, Joel Meyer pada tanggal 31 Januari 2022 sebagai bentuk ultimatum junta atas Prancis. Dengan demikian, Mali akan mendapatkan utilitas maksimal yang berada di angka 10 dan mendorong Prancis untuk menyerah yang memberikan nilai 0 (Maianhi and Liaga 2024, 142–43).

Analisis *chicken game* mengenai tindakan saling respon oleh Prancis dan Mali menghasilkan 2 *nash equilibrium* atau titik keseimbangan pada *payoff matrix* yang berada pada tindakan Prancis jika memilih *straight* ketika Mali memilih *swerve* dan jika Prancis memilih *swerve* ketika Mali memilih *straight* (Morrow 1994, 93).

3.2 Hasil *Chicken Game* pada Hubungan Prancis dan Mali dalam Konflik Mali Tahun 2019-2022

Ketegangan terjadi ketika Prancis memilih *straight* dan Mali memilih *straight* yang kemudian memengaruhi pola kerja sama dan hubungan diplomatik kedua negara selama periode 2019-2022. Dalam hal ini, periode tahun 2020-2022 merupakan puncak dari tindakan saling menggertak atau *bluffing* yang dilakukan

oleh Prancis dan Mali. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan oleh Prancis dan Mali tidak sepenuhnya bersifat rasional atau *bounded rationality*. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh emosi, tekanan domestik, identitas dan nilai, dan terbatasnya informasi. Oleh karenanya, seorang aktor cenderung mengambil keputusan dengan menggunakan heuristik (Langlois 1991, 811–812).

Studi kasus ini masih relevan jika diteliti dengan *chicken game* karena proses pengambilan keputusan Prancis dan Mali masih memenuhi kriteria *rational actor* dalam memaksimalkan utilitas jangka pendek. Prancis dan Mali sama-sama memiliki tujuan yang jelas yaitu *political benefit*, preferensi tindakan, serta faktor-faktor yang mendasari pengambilan tindakan. Selain itu, penggunaan *chicken game* pada penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam memahami logika dan interaksi strategis di bawah situasi yang penuh risiko (*risk*) dan ketidakpastian (*uncertainty*) (Osborne 2000, 4–5).

Dalam aspek rasionalitas, orientasi *political benefit*. Prancis memiliki kepentingan yang berupa *regional stability* yang dicapai dengan memerangi terorisme di Mali. Sedangkan Mali memiliki kepentingan yang berupa *sovereignty* yang dicapai dengan melakukan reformasi pemerintah dan menjalin kerja sama keamanan dengan *Wagner group* Rusia (Nasr 2022, 21–22).

3.2.1 Tekanan Junta Mali terhadap Prancis

Setelah pencabutan sanksi ECOWAS, junta Mali mulai secara agresif memutus hubungan diplomatiknya dengan Barat, termasuk Prancis. Mali menganggap apabila campur tangan Prancis terhadap Mali tidak hanya ditunjukkan melalui operasi militer, tetapi juga pada politik domestik. Keterlibatan Prancis dalam penjatuhan sanksi ECOWAS telah memicu respon balasan dari Mali. Secara

lebih rinci, pembalasan terhadap Prancis yang sekaligus menjadi strategi *straight* Mali dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Prancis menolak untuk melakukan dialog dengan kelompok teroris. Di tengah penolakan tersebut, otoritas Mali tetap mengupayakan negosiasi dengan kelompok teroris, JNIM untuk menghentikan konflik berdarah. Namun, upaya tersebut mengalami kendala ketika JNIM meminta pasukan asing untuk keluar terlebih dahulu dari Mali sebelum proses negosiasi dilaksanakan (International Crisis Group 2021, 15–19).
2. Meningkatnya jumlah kekerasan dan jumlah korban jiwa dari warga sipil Mali dari tahun ke tahun. Selama operasi militer berlangsung, Prancis kerap kali menyangkal bukti atas pembunuhan warga sipil di Mali dengan mengatakan jika seluruh orang yang terbunuh merupakan anggota teroris. Terkadang Prancis juga mendiskreditkan bukti temuan korban jiwa di sekitar wilayah dimana Prancis melancarkan serangan militer (Togola and Okur 2023, 378).
3. Masuknya pasukan Denmark ke wilayah Mali tanpa seizin otoritas Mali. Sebanyak 105 pasukan Denmark bergabung dalam misi *Takuba Task Forces* pada tahun 2020 untuk membantu operasi Barkhane dalam memerangi jihadis di Mali. Misi *Takuba Task Forces* merupakan misi gabungan yang menghimpun pasukan Eropa dan berada di bawah kepemimpinan Prancis (Elischer 2022, 21).
4. Adanya dukungan publik Mali untuk mengalihkan mitra kerja sama keamanan ke *Wagner group*, Rusia. Sebanyak 87% warga Mali

setuju atas kebijakan ini dan menyatakan dukungannya dalam sebuah aksi yang bernama *Yerewolo Debout sur les Ramparts* (Mohamedou 2024, 20).

5. Sanksi ECOWAS akibat kudeta kedua telah memperburuk situasi krisis masyarakat Mali. Masyarakat Mali juga kerap menganggap Prancis sebagai aktor yang memengaruhi kebijakan ECOWAS untuk menjatuhkan sanksi serta mengecam tindakan junta. Akibatnya aksi demonstrasi kembali terjadi di Bamako pada 14 Januari 2022. Ratusan orang turun ke jalan dan membawa tulisan "*Down with ECOWAS*" dan "*Down with France*" (Engels 2023, 148).

Puncak daripada tindakan balasan Mali ditunjukkan dengan mengusir duta besar Prancis, Joel Meyer oleh junta pada akhir Januari 2022 dan memintanya untuk segera meninggalkan Mali dalam waktu 72 jam. Upaya ini dianggap sebagai bentuk ultimatum Mali terhadap intervensi Prancis yang berkepanjangan. Pengusiran ini dirayakan oleh ribuan warga Mali dengan mengibarkan bendera Rusia dan membakar gambar presiden Macron. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 Februari 2022 di Bamako dan dipimpin oleh Adama Ben Diarra yang merupakan seorang pemimpin gerakan politik anti-Prancis (Abimbola et al. 2023, 169).

Aksi penolakan warga Mali terhadap Prancis juga dikonfirmasi kebenarannya oleh Moulaye Keita yang merupakan anggota dari CNT. Saat diwawancara, ia mengatakan "*There are thousands and thousands and thousands of Malians today who say 'No' to France. So, what the European Union and France need to do is respect the Malian authorities.*" Otoritas Mali juga yakin jika dengan kepergian Prancis, Mali dapat kembali bangkit serta memperoleh kedaulatan.

Dengan demikian pengusiran duta besar Prancis merupakan langkah awal untuk menepis pengaruh Prancis dan menuju kemandirian. Hal ini dikonfirmasi oleh Diarra dengan mengatakan “*It is an important step in the fight, but the victory must go all the way.*” Ia juga menambahkan, “*The next step must be the departure of French forces and then we will start the move towards economic and monetary sovereignty*” (Al Jazeera 2022).

Selanjutnya junta militer Mali menarik diri dari perjanjian pertahanan, SOFA dengan Prancis pada 2 Februari 2022. Keluarnya Mali dari perjanjian tersebut telah menjadi titik kebebasan bagi Mali dari pengaruh Prancis. Di saat yang sama, Mali juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari mitra keamanan yang baru, seperti Rusia. Dalam kerja sama antara keduanya, Mali telah membeli 4 helikopter Mi-17E dari Rusia pada tanggal 1 Oktober 2022 (Abimbola et al. 2023, 168).

Otoritas Mali juga menangguk media milik Prancis, *Radio France Internationale* dan *France 24* oleh setelah menyiarkan berita terkait pelanggaran HAM oleh FAMa. Pasukan keamanan Mali juga menahan seorang ekonom yang bernama Dr. Étienne Fakaba Sissoko sejak Januari 2022 atas tuduhan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Otoritas Mali juga mengusir seorang jurnalis dari majalah berita berbahasa Prancis, *Jeune Afrique* yang bernama Benjamin Roger. Pengusiran ini dilakukan pada Februari 2022 setelah Roger meliput berita pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Mali. Selain itu, seorang jurnalis dari TV Mali yang bernama Malick Konaté mengaku telah diancam oleh otoritas Mali semenjak ia membantu TV Prancis dalam meliput keberadaan *Wagner group* di Mali. Otoritas Mali juga kembali menangguk saluran berbahasa Prancis, TV5 Monde, pada 9 November 2022. Penanggukan ini terjadi

akibat penyiaran berita terkait serangan pesawat nirawak di kota utara Tinzaouatene tanpa meminta keterangan dari pihak Mali (Hassan 2023).

Seiring meningkatnya sentimen anti-Prancis, otoritas Mali juga melakukan pembatasan terhadap organisasi non-pemerintah yang dibiayai serta menerima dukungan teknis dari Prancis yang berlaku sejak 21 November 2022. Adapun beberapa organisasi tersebut diantaranya adalah *CCFD Terre-Solidaire*, *Handicap International*, *Médecins du Monde*, dan *Oxfam*. Organisasi ini sempat khawatir akan tindakan junta serta prihatin dengan situasi kemanusiaan di Mali. Pasalnya, ada sekitar 7,5 juta warga Mali atau mewakili 35% populasi yang membutuhkan bantuan kemanusiaan pada tahun 2021. Selain itu, Mali menduduki peringkat ke-184 dari 189 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia saat ini (Ursu, Cano, and McCluskey 2023).

Memang benar adanya jika Prancis masih menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Mali sampai sebelum pembatasan diberlakukan. Maiga juga menyampaikan bahwa bantuan tersebut adalah sebuah "*tipu daya yang dimaksudkan untuk menipu dan manipulasi opini publik dengan tujuan untuk mengacaukan dan mengisolasi Mali.*" Kemandirian dalam menyusun ulang kebijakan pembangunan menjadi hal yang krusial saat ini. Otoritas Mali juga tampak sedang mengupayakan konsep pembangunan yang berpegang pada 3 prinsip, yaitu menghormati kedaulatan Mali, menghormati pilihan mitra dan pilihan strategis yang dibuat oleh Mali, serta mempertimbangkan kepentingan vital rakyat Mali dalam pengambilan keputusan (Ouedraogo 2022).

Uni Eropa juga ikut menjatuhkan sanksi kepada 5 orang dari pemerintahan Goita pada 1 Februari 2022. Adapun orang-orang yang dimaksud adalah Choguel Maiga sebagai perdana menteri sementara Mali, Kolonel Malik Diaw, Kolonel

Ismael Wague, Adama Ben Diarra sebagai warga Mali yang terlibat dalam peristiwa kudeta 2020 sekaligus aktivis pro-Rusia, dan Ibrahim Ikassa Maiga. Sanksi individu ini berupa larangan perjalanan serta pembekuan aset. Selain itu, Uni Eropa juga menangguhkan 2 misi militernya, yaitu *European Union Training Mission in Mali* (EUTM) dan *European Union Capacity Building Mission in Mali* (EUCAP) (Emmott et al. 2022). Terhambatnya proses demokrasi di Mali juga telah membuat Prancis menangguhkan sementara operasi militer gabungannya di Mali yang dimulai sejak 3 Juni 2021. Dalam hal ini, presiden Macron mengatakan jika Prancis sudah tidak bisa mendukung Mali karena “*where there is no longer democratic legitimacy or transition*” (Al Jazeera 2021).

Pilihan *straight* tampak memberikan utilitas maksimal bagi Mali yang berada di angka 10, meski akhirnya Mali harus menerima sanksi ECOWAS setelah menunda pemilihan umum. ECOWAS mencabut sanksi pada Juli 2022 setelah junta Mali bersedia untuk menjadwalkan kekuasaannya hingga Maret 2024. Penjadwalan pemilihan umum yang dilakukan oleh junta dapat dinilai sebagai bentuk ketundukan terhadap ECOWAS, namun sanksi yang diberikan ECOWAS telah membuat hubungan antara Prancis dan Mali semakin renggang. Hal ini dikarenakan Prancis terlibat dalam proses penjatuhan sanksi. Selain itu, Mali juga menjalin kerja sama keamanan dengan Rusia pada akhir Desember 2021 yang nantinya akan menggantikan Prancis dalam misi melawan terorisme. Sehingga pilihan ‘bertahan’ kembali menjadi opsi utama dalam menghadapi Prancis (Adu and Mezyaev 2023, 172–173).

3.2.2 Perubahan Sikap Prancis atas Ultimatum Mali

Upaya Mali dalam menekan Prancis tampak berpengaruh pada berubahnya pilihan Prancis yang awalnya *straight* menjadi *swerve*. Seiring dengan

memburuknya situasi keamanan dan bertambahnya korban jiwa di Mali, Prancis memutuskan untuk mengurangi separuh dari pasukan militer Barkhane pada bulan Juni 2021. Hal ini disampaikan oleh presiden Macron secara virtual pada kesempatan *G5 Summit* yang diadakan di N'Djamena, Chad. Tercatat jika Prancis telah menempatkan sekitar 5.100 tentara untuk memerangi teroris di Mali. Selain itu, Prancis juga berencana akan mulai menutup pangkalan militernya di wilayah utara pada awal tahun 2022. Prancis memulai upaya ini dengan menarik pasukannya dari pangkalan militer Gao pada 9 Juni 2021 dengan menggunakan U.S. *Air Force* C-130. Selanjutnya, Prancis menyerahkan pangkalan militer Kidal kepada tentara Mali pada Oktober 2021. Penyerahan ini kemudian disusul dengan menyerahkan pangkalan militer di Tessalit pada November 2021 lalu diikuti dengan penyerahan pangkalan militer Timbuktu pada 14 Desember 2021. Setelah penyerahan ini, pangkalan militer di Timbuktu dialihkan oleh tentara Mali kepada tentara bayaran, *Wagner group* pada 7 Januari 2022 (Bhattacharya 2022, 233–34).

Pada 17 Februari 2022, Macron mengumumkan akan menarik sekitar 2.400 pasukannya dari Mali secara bertahap dalam kurun waktu empat sampai enam bulan. Pengumuman ini disampaikan pada kesempatan KTT UE-AU di Brussels. Dalam KTT tersebut, Macron juga menyampaikan akan menutup pangkalan militer Menaka, Gao, dan Gossi secara bertahap. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi Macron untuk merencanakan penarikan pasukan militer dari Mali yang diantaranya adalah sebagai berikut (Adela 2023, 63–74):

1. Per Januari 2021, survei membuktikan jika 51% warga Prancis tidak puas dengan Operasi Barkhane. Mereka menganggap jika operasi hanya membuang-buang anggaran tanpa adanya keuntungan nyata bagi Prancis.

2. Saat ini, para jihadis telah menguasai 2/3 wilayah Mali. Dengan adanya penguasaan wilayah tersebut, upaya *counterterrorism* semakin sulit dan cukup berisiko. Setidaknya terdapat 58 tentara Prancis dan 800 tentara Mali yang tewas dalam konflik Mali.
3. Junta Mali mengusir militer Prancis setelah beberapa waktu sebelumnya mengusir duta besar Prancis. Macron mengatakan, "*We cannot remain militarily engaged alongside de-facto authorities whose strategy and hidden aims we do not share.*"
4. Prancis melihat jika Mali sudah tidak potensial untuk memberikan keuntungan strategis bagi Prancis sejak kudeta kedua. Pemerintah Mali juga tampak tidak serius dalam memerangi terorisme. Dalam hal ini, junta Mali meminta adanya upaya dialog dengan kelompok-kelompok pembelot. Namun, Prancis menolak hal tersebut karena satu-satunya tuntutan mereka adalah ingin mendirikan negara Islam yang tampak kontradiktif dengan nilai demokrasi Prancis.
5. Junta Mali telah berpaling dari Prancis dengan memilih *Wagner group* sebagai mitra keamanan yang baru.

Setelah rencana penarikan pasukan diumumkan, pasukan Prancis mulai meninggalkan pangkalan militer Gossi pada 18 April 2022. Pada 14 Juni 2022, Prancis menyerahkan pangkalan Menaka kepada pasukan Mali. Hal ini disampaikan oleh staf umum pertahanan Prancis di hari Senin. Proses penarikan pasukan militer ini berakhir pada 15 Agustus 2022 dengan ditutupnya pangkalan militer Gao. Selanjutnya, pada tanggal 9 November, presiden Macron mengumumkan berakhirnya operasi militer Barkhane (King 2022, 8–9).

Dalam kerangka analisis *chicken game*, penarikan pasukan militer menunjukkan bahwa Prancis adalah “*chicken*” atau pihak yang terlebih dahulu mengalah dalam permainan ini. Dengan demikian, Prancis harus mendapatkan nilai utilitas 0 akibat menyerah atas ultimatum junta Mali. Keputusan tersebut diambil setelah melihat sikap Mali yang semakin konfrontatif dan agresif. Apabila Prancis tetap mengambil sikap *straight*, maka potensi konfrontasi langsung akan semakin besar serta semakin memperburuk eskalasi konflik. Oleh karena itu, langkah menyerah yang diambil oleh Prancis relevan dengan prinsip *conflict of inevitability* yang ada pada *chicken game*. Kondisi *bounded rationality* yang berupa keterbatasan kemampuan kognitif dan informasi membuat Prancis mengambil tindakan dengan menggunakan heuristik. Dalam konteks ini, penarikan pasukan militer dari Afghanistan pada tahun 2012 menjadi sumber pembelajaran strategis bagi Prancis saat dihadapkan dengan dinamika konflik Mali tahun 2019-2022 (Lotfi 2024, 95).

Hasil akhir daripada permainan ini dikategorikan sebagai *asymmetric nash equilibrium* (Prancis, *swerve* dan Mali, *straight*). Hal ini dikarenakan dari 2 *nash equilibrium chicken game* yang telah disebutkan sebelumnya, situasi yang terjadi adalah Mali berhasil bertahan dengan strategi *straight* yang memberikan nilai utilitas 10 dan Prancis akhirnya memilih untuk menyerah dengan nilai utilitas 0. Akan tetapi, tindakan menyerah tidak serta merta didefinisikan sebagai kekalahan mutlak bagi Prancis sebagaimana dalam permainan *non zero-sum* bahwa keuntungan seorang pemain bukan berarti kekalahan bagi pemain lain. Dalam hal ini, penarikan pasukan militer dari Mali bukan akhir daripada intervensi Prancis di Afrika. Prancis melakukan perubahan strategi militernya di Mali. Prancis mengalokasikan pasukan militernya ke negara tetangga, seperti Niger dan Chad

untuk tetap bisa menjalankan misi *counterterrorism* (Tánczos and Fejérdy 2023, 36–37).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Permintaan bantuan militer yang dilakukan Mali kepada Prancis pada tahun 2012 telah mengakibatkan intervensi yang berkepanjangan dan meningkatkan angka ketidakpuasan masyarakat Mali. Sejak tahun 2019, operasi militer ini mulai menunjukkan kegagalan karena pasukan militer Prancis yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan model konflik. Mayoritas dari masalah keamanan Mali dipicu oleh serangan kelompok teroris, seperti ISGS, JNIM, MUJAO, dan AQIM. Perubahan model konflik terjadi ketika kelompok teroris bergabung ke dalam aksi pemberontakan rakyat terhadap pemerintahan IBK, sehingga pasukan militer sulit untuk mengidentifikasi anggota teroris.

Dalam merespon brutalnya serangan terorisme di tahun 2019, Prancis meluncurkan operasi militer gabungan bernama *Takuba Task Force*. Operasi militer ini dilakukan karena dilatarbelakangi dengan beberapa kepentingan Prancis terhadap Mali seperti ekonomi, politik, dan keamanan. Tambang uranium di Niger menjadi sumber energi utama bagi perusahaan AREVA untuk menyalurkan listrik di beberapa negara di belahan dunia. Dengan demikian, keterlibatan Prancis di Mali dapat menjadi salah satu cara untuk memproteksi tambang uranium dari penguasaan negara lain.

Dalam aspek politik dan keamanan, Prancis ingin mempertahankan pengaruhnya kolonialnya di Mali dengan mengambil peran *counterterrorism*. *Counterterrorism* ini juga dimaksudkan untuk menghadang masuknya kelompok ekstrim ke wilayah Eropa. Akan tetapi, operasi militer yang dilakukan oleh Prancis

menunjukkan bahwa terdapat banyak campur tangan asing dan mengabaikan kedaulatan Mali. Bulan Juni dan Juli 2020 merupakan puncak dari kemarahan rakyat atas IBK dan Prancis yang kemudian disusul dengan kudeta pertama militer pada 18 Agustus 2020 dan kudeta pertama militer pada 24 Mei 2021. Kudeta ini telah membuat Prancis memberikan tekanan kepada junta untuk mengembalikan pemerintahan sipil. Tekanan ini bahkan melibatkan Uni Eropa dengan menjatuhkan sanksi kepada Mali yang kemudian membuat hubungan antara Prancis dan Mali semakin memanas.

Analisis *chicken game* pada studi kasus ini menunjukkan jika Prancis dan Mali merupakan aktor yang terlibat dalam konflik Mali tahun 2019-2022. Prancis dan Mali sama-sama memiliki kepentingan dan bersifat kontradiktif, yaitu *regional stability* bagi Prancis dan *sovereignty* bagi Mali. Untuk mencapai kepentingan tersebut, maka keduanya harus menyusun segenap skenario strategi, memperhitungkan untung rugi dari strategi yang diambil, dan upaya untuk menekan pihak lawan agar menyerah. Pertimbangan tersebut telah menghadirkan 2 strategi tindakan, yaitu *straight* dan *swerve* dengan nilai *expected utility* yang berupa:

1. Skenario 1: Prancis memilih *straight* (10) dan Mali memilih *swerve* (0), maka *straight* > *swerve* yang menjadi strategi terbaik.
2. Skenario 2: Prancis memilih *swerve* (5) dan Mali memilih *swerve* (5) merupakan strategi pilihan terbaik kedua.
3. Skenario 3: Prancis memilih *swerve* (0) dan Mali memilih *straight* (10), maka *swerve* > *straight* menjadi strategi yang dihindari.
4. Skenario 4: Prancis memilih *straight* (-5) dan Mali memilih *straight* (-5), maka ini menjadi strategi dengan konsekuensi paling buruk dan dihindari oleh Prancis dan Mali.

Terdapat 2 *nash equilibrium* yang diciptakan dari 4 skenario, yaitu ketika Prancis *straight* (10) dan Mali *swerve* (0) atau ketika Mali *straight* (10) dan Prancis *swerve* (0).

Pada realitanya, Prancis adalah pihak yang terlebih dahulu menyerah setelah memperoleh tekanan dari Mali. Upaya mundur yang dilakukan oleh Prancis mengacu pada prinsip *conflict of inevitability* pada *chicken game*. Upaya ini diawali dengan menutup pangkalan militernya di akhir tahun 2021 yang kemudian disusul dengan penarikan pasukan militernya pada Februari 2022. Selanjutnya pada bulan Agustus 2022, Prancis mengumumkan bahwa operasi militer Barkhane di Mali resmi berakhir. Keputusan ini diambil setelah melalui proses yang cukup panjang dan riskan. Banyak upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk tetap bisa mempertahankan pengaruhnya di Mali seperti operasi militer gabungan, mengecam aksi kudeta, hingga terlibat dalam proses penjatuhan sanksi terhadap Mali oleh ECOWAS.

Disisi lain, strategi *straight* oleh Mali ditunjukkan dengan beberapa tindakan seperti:

1. Menjalin kerja sama keamanan dengan *Wagner group* (Rusia) pada Desember 2021;
2. Keluar dari perjanjian pertahanan dengan Prancis, SOFA dan;
3. Mengusir duta besar Prancis pada Februari 2022;
4. Menangguhkan saluran TV yang terafiliasi dengan Prancis;
5. Menahan jurnalis yang terafiliasi dengan Prancis dan beberapa tokoh yang kontra pemerintah; dan
6. Melakukan pembatasan terhadap organisasi non-pemerintah yang terafiliasi dengan Prancis;

Tindakan-tindakan inilah yang akhirnya mampu mempengaruhi keputusan Prancis untuk ‘menyerah.’ Oleh karena itu, akhir daripada permainan *chicken game* pada hubungan Prancis dan Mali menghasilkan *asymmetric nash equilibrium* dengan Mali sebagai pihak yang bertahan strategi *straight* dan Prancis sebagai pihak yang memilih *swerve*. Dari *non zero-sum game*, tindakan *swerve* atau menyerah tidak didefinisikan sebagai kekalahan mutlak bagi Prancis. Prancis mengubah strategi yang bertujuan agar tetap menjalankan misi *counterterrorism* atas Mali tanpa terlibat langsung dengan memindahkan pasukan militernya ke negara tetangga, seperti Niger dan Chad.

4.2 Rekomendasi

Setelah melakukan analisis *chicken game* pada dinamika hubungan Prancis dan Mali saat konflik Mali tahun 2019-2022, maka penulis merekomendasikan aspek-aspek yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian selanjutnya, seperti:

1. Studi kasus ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori poskolonial untuk memahami secara komprehensif terkait hubungan Prancis dengan Mali sebagai negara bekas jajahannya.
2. Penelitian *chicken game* pada studi kasus ini yang hanya terbatas pada *strategic form*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkannya menjadi *extensive form* dengan meneliti model permainan berulang (*repeated games*) yang dilakukan oleh Prancis dan Mali.
3. Penelitian dengan menggunakan *game theory* juga dapat diaplikasikan untuk melihat strategi atau tindakan antara negara

super power dalam konflik Mali, seperti Prancis dan Rusia untuk saling mempertahankan pengaruhnya di Mali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimbola, Damilola Waliyullahi, Akin Ademuyiwa, Kayode Olusola Omotade, and Oluwafemi Adeola. 2023. "The Russo-Malian Cooperation: A Win or Loss for France?" *Journal of Danubian Studies and Research* 12 (2): 166–75. <https://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/1693>.
- Adela, Gershon. 2023. "A Force for the Right Purpose? Rethinking Western COIN Interventions in Africa's Sahel." *Journal of Military and Strategic Studies* 22 (3). <https://jmss.org/article/view/77361>.
- Adu, Yao, and Aleksandr Mezyaev. 2023. "The Conflict Between ECOWAS and Mali: International Legal and Political Aspects." *INTERNATIONAL ORGANISATIONS RESEARCH JOURNAL* 18 (1): 170–89. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2023-01-07>.
- Africa Center for Strategic Studies. 2023. "Mali Junta Scuttles Security Partnerships While Violence Surges." Africa Center for Strategic Studies. 2023. <https://africacenter.org/spotlight/mali-military-junta-scuttles-security-partnerships-while-militant-violence-surges/>.
- Ali, Panira. 2018. "FRENCH COLONIALISM TO NEO-COLONIALISM IN MALI: AN ANALYTICAL STUDY." *Journal of European Studies* 34 (2): 112–29. <https://www.proquest.com/openview/e50f91bdfae3a5c8f2bad7f2f7561c9c/1?cbl=616525&pq-origsite=gscholar>.
- Baldaro, Edoardo, and Silvia D'Amato. 2024. "Transnational Counterterrorism Assemblages: The Case of Preventing and Countering Violent Extremism in Mali." *Territory, Politics, Governance* 12 (4): 519–36. <https://doi.org/10.1080/21622671.2023.2268651>.
- Bertrand, Eloïse, Tony Chafer, and Ed Stoddard. 2024. "(Dis)Utilities of Force in a Postcolonial Context: Explaining the Strategic Failure of the French-Led Intervention in Mali." *Journal of Intervention and Statebuilding* 18 (3): 286–305. <https://doi.org/10.1080/17502977.2023.2278268>.
- Besenyő, János, and Andrea Hanna Sólyomfi. 2024. "Mali: Safe Heaven to Terrorist?" In *Perspectives on Development in the Middle East and North Africa (MENA) Region*, edited by János Besenyő, Leonid Issaev, and Andrey Korotayev, Part F2521:153–67. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53429-4_8.
- Bhattacharya, Samir. 2022. "Political Crisis in Mali: Uneasy Present, Political Crisis in Mali: Uneasy Present, Political Crisis in Mali: Uneasy Present, Uncertain Future Uncertain Futur." *National Security* 5 (2): 232–57. <https://doi.org/10.32381/NS>.
- Charbonneau, Bruno. 2021. "Counter-Insurgency Governance in the Sahel." *International Affairs* 97 (6): 1805–23. <https://doi.org/10.1093/IA/IIAB182>.
- Dolman, Everett. 2021. "French Armed Forces." Embassy of France in the United States. 2021. https://franceintheus.org/IMG/pdf/FAFU/FAFU_007c.pdf.
- Doucet, Ghislaine, Bruno Demeyere, and Julie Boulmier. 2021. "To Respect and Ensure Respect for IHL: Interview with Representatives of the French Ministry for the Armed Forces and Ministry of Europe and Foreign Affairs." *International Review of the Red Cross* 103 (918): 843–58. <https://doi.org/10.1017/S1816383122000340>.
- Doukhan, David. 2022. "The End of Operation Barkhane." *International Institute*

- for Counter-Terrorism 11 (27): 1–6.
<https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/11/09/fin-officielle-de-l-operation-militaire-barkhane-apres-pres->
- Eichler, Jan. 2023. “The Vicious Circle Starts: The French Military Interventions in the Countries of the MENAP.” In *Terrorism in Contemporary France*, edited by Jan Eichler, 57–85. Contributions to Political Science. Cham: Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-031-23551-1>.
- Elischer, Sebastian. 2022. “Populist Civil Society, the Wagner Group, and Post-Coup Politics in Mali.” *West African Papers*, West African Papers, 36 (July):3–34. <https://doi.org/10.1787/B6249DE6-EN>.
- Engels, Bettina. 2023. “Coups and Neo-Colonialism.” *Review of African Political Economy* 50 (176): 147–53.
<https://doi.org/10.1080/03056244.2023.2269693>.
- European Council on Foreign Policy. 2019. “Operation Barkhane - Mapping Armed Groups in Mali and the Sahel.” European Council on Foreign Policy. 2019.
https://ecfr.eu/special/sahel_mapping/operation_barkhane.
- Fariaty, Citra N. 2022. “French Role in Conflict Resolution Efforts in Mali.” *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)* 1 (2): 315–29. <https://doi.org/10.58526/JSRET.V1I2.110>.
- Filippov, V.R. 2015. “Uranium Factor in France’s Foreign Policy towards Africa.” *SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences*, no. 2, 171–85. <https://doi.org/10.25136/1339-3057.2015.2.66564>.
- Fisayo-Bambi, Jerry. 2024. “AU, ECOWAS, and French President Condemn Mali Coup | Africanews.” Africa News. 2024.
<https://www.africanews.com/2021/05/26/au-ecowas-and-french-president-condemn-mali-coup/>.
- Foster, Amelia. 2022. “Leadership Dynamics in Foreign Interventions: Russia and France in Mali 2012-2022.” *Leadership and Developing Societies* 7 (1): 1–52.
<https://doi.org/10.47697/LDS.35360010>.
- Fournier, Ismaël. 2020. “Insurgency and Counterinsurgency Dynamics in Mali.” *Canadian Military Journal* 21 (1): 4–16.
https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/army/lineofsight/files/articlefiles/en/Insurgency_and_Counterinsurgency_Dynamics_in_Mali.pdf.
- Freudenthal, Emmanuel, Patricia Huon, Hénri Nsaibia, Youri Weide, and Mamoudou Bolly. 2021. “Uncovering the Civilian Toll of France’s Anti-Jihadist War in Mali.” *The New Humanitarian*. 2021.
<https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2021/6/16/uncovering-the-civilian-toll-of-france-anti-jihadist-war-in-Mali>.
- Gazeley, Joe. 2022. “The Strong ‘Weak State’: French Statebuilding and Military Rule in Mali.” *Journal of Intervention and Statebuilding* 16 (3): 269–86.
<https://doi.org/10.1080/17502977.2022.2030627;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>.
- Haidara, Boubacar. 2024. “Popular Support: The Only Basis of Legitimacy for West Africa’s New Military Regimes?” *Africa Today* 70 (4): 97–104.
<https://doi.org/10.2979/AT.00015>.
- Hassan, Tirana. 2023. “Mali Events of 2022.” Human Right Watch. 2023.
<https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/mali>.

- Human Rights Council. 2020. "Human Rights Council Forty-Third Session Situation of Human Rights in Mali Report of the Independent Expert on the Situation of Human Rights in Mali Summary." https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/A_HRC_43_76.pdf.
- International Crisis Group. 2021. "Mali: Enabling Dialogue with the Jihadist Coalition JNIM." Brussels. <https://www.ecoi.net/en/file/local/2065073/306-mali-jnim.pdf>.
- International Crisis Group. 2023. "Mali: Avoiding the Trap of Isolation." Brussels. <https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2023-03/b185-mali-trap-of-isolation.pdf>.
- Jazeera, Al. 2021. "France Halts Joint Army Operations with Malian Forces over Coup | News | Al Jazeera." Al Jazeera. 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/6/3/france-suspends-joint-military-operations-with-malian-forces>.
- Jazeera, Al. 2022. "Thousands in Mali Celebrate Expulsion of French Ambassador | Armed Groups News | Al Jazeera." Al Jazeera. 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/5/thousands-in-mali-celebrate-expulsion-of-french-ambassador>.
- Kanti, Mady Ibrahim. 2013. "The French Intervention in Mali." https://www.academia.edu/30994130/The_French_Intervention_in_Mali.
- King, Isabelle. 2022. "HOW FRANCE FAILED MALI: THE END OF OPERATION BARKHANE THE END OF OPERATION BARKHANE on JSTOR." *Harvard International Review* 43 (4): 6–10. <https://www.jstor.org/stable/27278233>.
- Korotayev, Andrey, and Alina Khokhlova. 2022. "Revolutionary Events in Mali, 2020–2021." In *Perspectives on Development in the Middle East and North Africa (MENA) Region*, edited by Leonid Issaev and Andrey Korotayev, 191–218. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15135-4_9.
- Krieger, Gerald. 2022. "Challenges in Mali, the Importance of Legitimate Governance in Combating Terrorism and Violent Extremism." *Journal of Strategic Security* 15 (3): 22–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.5038/1944-0472.15.3.2009>.
- Langlois, Jean-Pierre P. 1991. "Rational Deterrence and Crisis Stability." *American Journal of Political Science* 35 (4): 801–32. <https://doi.org/10.2307/2111495>.
- Lebovich, Andrew. 2021. "After Barkhane: What France's Military Drawdown Means for the Sahel | ECFR." European Council on Foreign Policy. 2021. <https://ecfr.eu/article/after-barkhane-what-frances-military-drawdown-means-for-the-sahel/>.
- Lotfi, Sour. 2024. "French Interventionism in the Sahel: A Flawed Strategy, Imperfect Geopolitics." *Przegląd Geopolityczny* 48 (02): 91–112. https://scholar.google.fr/citations?view_op=view_citation&hl=fr&user=4uWwuGcAAAAJ&citation_for_view=4uWwuGcAAAAJ:4TOpqG69KYC.
- Ma'rifat, Filasafia Marsya. 2021. "Implementasi Budaya Strategis Prancis Melalui Prinsip Anti-Terrorisme Dalam Operasi Serval (2013-2014)." *Jurnal Hubungan Internasional* 14 (2): 237–55. <https://doi.org/10.20473/JHI.V14I2.32334>.
- Maianhi, Delcio, and Emmaculate Asige Liaga. 2024. "The Impact of Economic Sanctions as a Response to Coups in Africa: Case of Mali." In *The Resurgence of Military Coups and Democratic Relapse in Africa*, edited by Adeoye

- Akinola, 137–58. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51019-9_6.
- MINUSMA. 2020. “Note on Trends of Human Rights Violations and Abuses in Mali 1 April – 30 June 2020.” https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/quaterly_note_on_human_rights_trends_april-june_2020_english_version_final.pdf.
- Mohamedou, Kemal. 2024. *The Wagner Group, Russia’s Foreign Policy and Sub-Saharan Africa*. Edited by Jean-Marc Rickli. *Geneva Paper*. Vol. 32. Geneva: Geneva Centre for Security Policy. www.gcsp.ch/publications.
- Moreno-Cosgrove, Naomi. 2022. “Developments, Consequences of French Involvement and Options for European Security and Defence Policy.” https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/85190/ssoar-2022-moreno-cosgrove-Terrorism_in_the_Sahel_Developments.pdf;jsessionid=7FD5402623522BB77E0D7BFBEA4A04E9?sequence=1.
- Morgan, Andy. 2020. “Democracy versus the People: Mali Has Seen a Government Coup Following Escalating Protests. What Has Caused the Unrest?” *Index on Censorship* 49 (4): 42–45. https://doi.org/10.1177/0306422020981273/ASSET/D5F5A7BC-6E9F-4749-A4F8-2F5F31B2363A/ASSETS/IMAGES/LARGE/10.1177_0306422020981273-IMG1.JPG.
- Morrow, James D. 1994. *Game Theory for Political Scientists*. *Game Theory for Political Scientists*. New Jersey: Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/J.CTVZXX9QG>.
- Nasr, Wassim. 2022. “How the Wagner Group Is Aggravating the Jihadi Threat in the Sahel.” *CTC-SENTINEL* 15 (11): 21–30. <https://ctc.westpoint.edu/how-the-Wagner-group-is-aggravating-the-jihadi-threat-in-the-sahel/>.
- Olech, Aleksander. 2023. “French Operation Barkhane in Africa – Success or Failure?” *Stosunki Międzynarodowe – International Relations* 3 (17): 17. <https://doi.org/10.12688/STOMIEDINTRELAT.17737.1>.
- Osborne, Martin. 2000. *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press. https://mathematicalolympiads.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/08/martin_j-osborne-an_introduction_to_game_theory-oxford_university_press_usa2003.pdf.
- Ouedraogo, Lassane. 2022. “Cuts, Bans and Tensions: Franco-Malian Relations in 2022.” The Centre for Democracy and Development. 2022. <https://www.cddwestafrica.org/reports/cuts-bans-and-tensions-franco-malian-relations-in-2022/>.
- Prasetyo, Andi Dwi. 2024. “Kerja Sama Kontra Terorisme Mali-Prancis: Pengaruh Perubahan Identitas Nasional Mali Pada Pengambilan Kebijakan Luar Negeri.” *Global Strategis* 18 (1): 107–28. <https://doi.org/10.20473/JGS.18.1.2024.107-128>.
- Ricard, Maxime. 2022. “MALI KURA, MALI FANGA THE POLITICAL TRAJECTORY OF MALI UNDER MILITARY RULE.” *Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire*, no. 132. https://www.irsem.fr/storage/file_manager_files/2025/03/rp-irsem-132-ricard-mali-en.pdf.
- Roth, Kenneth. 2022. “World Report 2022: Mali | Human Rights Watch.” Human

- Right Watch. 2022.
<https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/mali>.
- Socher, Johannes. 2023. “Assistance to Constitutional Courts in Fragile Contexts : The Case of Mali, 2017–2022.” *Verfassung Und Recht in Ubersee* 56 (1): 241–56. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-2023-1-241>.
- Spet, Stéphane. 2015. “Operation Serval. Analyzing the French Strategy against Jihadists in Mali.” *ASPJ Africa & Francophonie* 6 (3): 66–79. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_French/journals_E/volume-06_Issue-3/spet_e.pdf.
- Stigall, Dan. 2015. “The French Military Intervention in Mali, Counter-Terrorism, and the Law of Armed Conflict.” *Military Law Review* 223 (1): 1–40. https://www.researchgate.net/publication/292401372_The_French_military_intervention_in_Mali_counter-terrorism_and_the_law_of_armed_conflict.
- Strauss, Marine, and David Evans. 2022. “EU Imposes Sanctions on Mali’s PM, Coup Leaders | Reuters.” Reuters. February 4, 2022. <https://www.reuters.com/world/africa/eu-imposes-sanctions-malis-pm-coup-leaders-2022-02-04/>.
- Tánczos, Mariann, and Gergely Fejérdy. 2023. “Forced Withdrawal: The Case of France in the Sahel Region.” *Journal of Central and Eastern European African Studies* 3 (4): 31–43. <https://doi.org/10.59569/JCEEAS.2023.3.4.242>.
- Thurston, Alexander. 2020. *Jihadists of North Africa and the Sahel: Local Politics and Rebel Groups*. Jihadists of North Africa and the Sahel: Local Politics and Rebel Groups. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108771160>.
- Togola, Amadou, and Mehmet Okur. 2023. “Disguise of France Unilateral Policy through European Multilateralism in Mali from Operation Serval to Withdrawal of Barkhane Operation.” *Journal of TESAM Academy* 10 (2): 369–90. <https://doi.org/10.30626/TESAMAKADEMI.1333582>.
- UNHCR. 2022. “UNHCR Position on Returns to Mali – Update III | Refworld.” 2022. <https://www.refworld.org/policy/countrypos/unhcr/2022/en/124032>.
- United States Department of State. 2019. “MALI 2019 HUMAN RIGHTS REPORT.” <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/MALI-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>.
- Ursu, Elena, Alejandro Cano, and Padraic McCluskey. 2023. “ENABLING ACCESS COORDINATION: THE ROLE OF THE MALI WORKING GROUP.” https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/enabling-access-coordination-mali/the-role-of-the-mali-working-group_english.pdf.
- Zulueta-Fülscher, Kimana, and Thibaut Noël. 2022. “THE 2021 COUP PANDEMIC: POST-COUP TRANSITIONS AND INTERNATIONAL RESPONSES.” In *ANNUAL REVIEW OF CONSTITUTION-BUILDING: 2021*, 74–102. Stockholm. <https://doi.org/https://doi.org/10.31752/idea.2022.36>.